

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DISEKTOR PERTANIAN PADA TAHUN 2015 – 2019 DI DESA
HARJAWINANGUN KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN
TEGAL**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Faqa Difa'i

1506016009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

NOTA PEMBINGBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Faqo Difa'i

NIM : 1506016009

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa terhadap Pembangunan di Sektor Pertanian pada tahun 2015 – 2019 di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian , atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

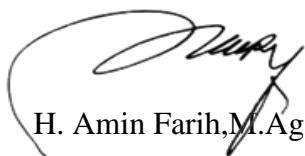
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 November 2020

Pembingbing

Bidang Metodologi Dan Tatatulis

Bidang Substansi Materi



H. Amin Farid, M.Ag

Tanggal : 10 – 11- 2020



Solkhah Mufrikah, M.Si

Tanggal : 11 – 11- 2020

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR
PERTANIAN PADA TAHUN 2015 – 2019 DI DESA HARJAWINNAGUN
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

Disusun Oleh :

Faço Difa'i

1506016009

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 30 November
2020 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

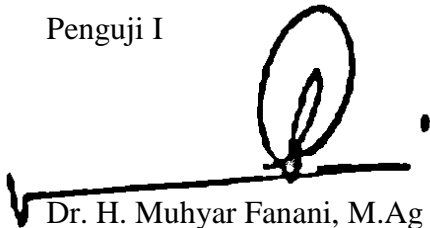
Ketua



Dr. Ahawan Fanani M.Ag

NIP. 197809302003121001

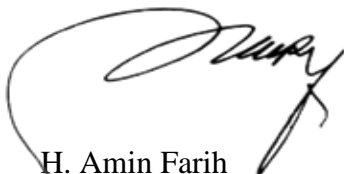
Penguji I



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

NIP. 197303142001121001

Pembingbing I



H. Amin Farih

NIP. 197106142000031002

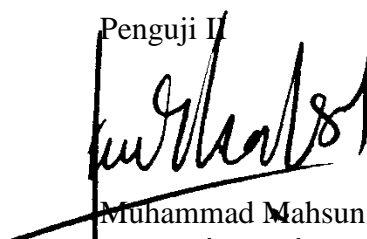
Sekretaris



Solkhah Mufrikhah M.Si

NIDN. 2010058501

Penguji II



Muhammad Mahsun M,A

NIDN. 2025118501

Pembingbing II



Solkhah Mufrikhah M,Si

NIDN. 2010058501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan ddalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2020

Faço Difa'i

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita, sehingga penulis skripsi dengan judul Politik Pembangunan Desa 9 studi tentang peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian di desa harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal) dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah sampai dengan zaman yang terang benderang sampai saat ini serta menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada jurusan ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN walisongo semarang. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan mengucapkan rasa terimakasih keberbagai pihak yang telah memebirak bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada.

1. Yang Terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Adib, S.Ag. M.Si dan Muhamad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. H. Amin farih dan Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhyar Fanani selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan nasihat – nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Moh. Badruzzaman selaku kepala desa serta perangkat desa yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di desa yang bapak pimpin.
9. Semua informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Azis dan Ibu Mufatiha yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
11. Untuk kedua adik – adik saya yang luar biasa yaitu Muhandis Difa'i dan Fayyaz yassar Difa'i yang selalu memberikan dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang ini dan doa yang tanpa henti.
12. Keluarga besar H. Yusuf dan H. Ghozali yang selalu mendoakan penulis serta memberikan dorongan dalam hal apapun.
13. Keluarga besar UKM MAWAPALA yang banyak memberikan motivasi serta semangat terhadap penulis. Serta memberikan banyak ilmu tentang artinya sebuah tanggung jawab dan loyalitas.
14. Kawan – kawan angkatan PASA ADHIRAJASA MAWAPALA (Budi, Nabila, Fahri, Masykuri, Farid, Syarif, Nani, Lulul, Rahma, Khoirina) yang selalu menemani perjalanan dari awal Perkuliah sampai saat ini. Serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
15. Teman-teman Ilmu Politik FISIP 2015 dan KKN Mandiri Posko 56 Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang yang telah memberikan masukan dan ilmu serta pengalaman di bidang akademik maupun non akademik bagi penulis.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan banyak terimakasih. Penulis sadar dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan serta kesalahan. Kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sangat diharapkan untuk perbaikandimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.

PERSEMBAHAN

Karya Ini Penulis Memperssembahkan Kepada.

Kedua Orang Tua Penulis Yang Selalu Memberikan Kasih Sayang Tiada Henti.

MOTTO

“Manusia Akan Selalu Berusaha, Tetapi Kehendak Yang Diatas Juga Yang Bakal Memutuskan.”

- Norman Edwin

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan setiap program strategis pembangunan dalam upaya memperkuat desa serta langkah mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera sebagai tujuan otonomi daerah. Dalam pembangunan desa butuh peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Peranan dapat diartikan sebagai fungsi dan kedudukan seseorang di masyarakat, artinya suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi kedudukan dalam masyarakat. Serta peranan menjadi hak dan kewajiban seseorang atau lembaga dalam menjalankan perannya, bagaimana dampak yang dihasilkan setelah seseorang atau lembaga melaksanakan perannya di masyarakat.

Desa harjawinangun merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa harjawinangun adalah lahan pertanian yang sangat luas. Lahan pertanian di desa harjawinangun dimanfaatkan masyarakat desa sebagai sumber mata pencaharian, dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Dalam aktifitasnya masyarakat tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang dihadapi seperti permasalahan irigasi. Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan peran dari pemerintah desa dalam penyelesaiannya.

Penelitian yang dilakukan berjudul peran pemerintah desa Harjawinangun terhadap pembangunan sektor pertanian pada tahun 2015 – 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan sektor pertanian di desa harjawinangun. 2) Adakah faktor kendala serta pendukung dalam menjalankan perannya terhadap pembangunan di sektor pertanian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pemerintah desa Harjawinangun telah menjalankan beberapa perannya terhadap pembangunan di sektor pertanian. Pemerintah desa yaitu kepala desa telah memberikan semangat kepada petani desa melalui sambutan – sambutan yang dilakukannya melalui kegiatan kemasyarakatan seperti peringatan hari besar yang diadakan masyarakat. Akan tetapi peran yang dilakukan belum menunjukkan harapan terhadap pembangunan di sektor pertanian dengan baik, dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat di sektor pertanian. Program – program secara khusus pada tahun 2015 – 2019 di bidang pertanian sebagai peningkatan kualitas petani desa belum diadakan seperti program pembinaan terhadap masyarakat di bidang pertanian melalui pelatihan ataupun penyuluhan. Pembangunan sarana prasarana di bidang pertanian telah dilaksanakan beberapa sebagai penunjang aktifitas masyarakat di sektor pertanian seperti jalan, jembatan dan pavingisasi gang di desa harjawinangun, pembangunan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas – aktifitasnya. Akan tetapi pembangunan sarana prasarana tersebut belum benar – benar menyelesaikan permasalahan pertanian yang dihadapi masyarakat desa Harjawinangun. Seperti yang telah

diketahui bahwa permasalahan terbesar dalam aktifitas pertanian yaitu irigasi. Pembangunan irigasi telah direncanakan pemerintah desa dan akan dilaksanakan ditahun 2020 atau 2021. Faktor pendanaan menjadi hambatan bagi pemerintah desa harjawinangun untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan yang baru dilakukan yaitu pembangunan jembatan, jalan, drainase, dan pavingisasi di gang – gang.

Kata kunci : Peran. Pembangunan. Pemerintah Desa

ABSTRACT

The implementation of village government cannot be separated from the implementation of regional autonomy, village government is the spearhead of service to the community to realize the success of any strategic development program in an effort to strengthen the village and to accelerate the realization of a prosperous society as the goal of regional autonomy. In village development, the role of the government is needed to create welfare in the community. Role can be defined as a person's function and position in society, this means that a person's behavior or behavior includes norms that are expressed by a position in society. As well as roles are the rights and obligations of a person or institution in carrying out their role, how is the impact generated after a person or institution carries out its role in the community.

Harjawinangun Village is a village that has potential resources that can be utilized. The natural resource potential of the village of Harjawinangun is a very large agricultural land, the agricultural land in the village of Harjawinangun is utilized by the village community as a livelihood, judging from the many people who have a profession as farmers. In carrying out their activities, the community cannot be separated from the problems they face, such as irrigation problems. These problems certainly require the role of the village government in solving them.

The research conducted entitled the role of the Harjawinangun village government in the development of the agricultural sector in 2015 - 2019, with the following problem formulations: 1) What is the role of the village government in the development of the agricultural sector in the village of Harjawinangun. 2) Are there constraints and support factors in carrying out its role towards development in the agricultural sector. The research method that I use is a qualitative method with a case study approach that is a study in which the researcher explores a particular phenomenon in a given time and activity. Data collection in this study uses observation, interview, and documentation techniques. Analysis of the data used through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are that the village government of Harjawinangun has played several roles in development in the agricultural sector. The village government, namely the village head, has encouraged village farmers through remarks he has made through community activities such as commemoration of holidays held by the community. However, the role that is carried out has not shown hope for development in the agricultural sector properly, it can be seen from the problems faced by the community in the agricultural sector. Specific programs in 2015 - 2019 in the agricultural sector as an improvement in the quality of village farmers have not been held such as community development programs in agriculture through training or counseling. The construction of infrastructure in the agricultural sector has been carried out in several ways to support community activities in the agricultural sector such as roads, bridges and paving of alleys in the village of Harjawinangun. The development aims to facilitate the community in carrying out its activities. However, the construction of these infrastructure facilities has not really solved the agricultural problems faced by the people of Harjawinangun village. As is well known, the biggest problem in agricultural activities is irrigation. Irrigation development has been

planned by the village government and will be implemented in 2020 or 2021. The funding factor is an obstacle for the village government of Harjawinangun to carry out development in various sectors. The construction that has just been carried out is the construction of bridges, roads, drainage, and paving in alleys.

Keyword : Role, development, village government.

الملخص

لا يفصل تنفيذ حكومة القرية عن تنفيذ الحكم الذاتي الاقليمي , فحكومة القرية هي راس الحربة في خدمة المجتمع لتحقيق نجاح كل بر مج نمو استراتيجي في محالة لتقوية القرى وتسريع تحقيق مجتمع مزدهر كهدف للحكم الذاتي الاقليمي. في تنمية القرية ، هناك حاجة لدور الحكومة لخلق الرفاهية في المجتمع. يمكن تفسير الدور على أنه وظيفة وموقع الشخص في المجتمع ، مما يعني أن سلوك أو سلوك الشخص يتضمن القواعد التي يتم التعبير عنها من خلال موقف في المجتمع. إضافة إلى دور كونها حقوق والتزامات للشخص أو مؤسسة في أداء دورها ، كيف يحدث الأثر بعد أن يقوم شخص أو مؤسسة بدورها في المجتمع.

قرية Harjawinangun هي قرية لديها موارد محتملة يمكن الاستفادة منها. تعد إمكانيات الموارد الطبيعية لقرية Harjawinangun أرضاً زراعية كبيرة جداً. الأرض الزراعية في قرية هارجاوينانجون يستخدمها مجتمع القرية كمصدر لكسب الرزق ، ينظر إليها من قبل العديد من الناس الذين يعملون كمزارعين. في أنشطتهم ، لا يمكن فصل المجتمع عن المشاكل التي يواجهونها ، مثل مشاكل الري. هذه المشاكل تتطلب لتأكيد دور حكومة القرية في حلها..

تم إجراء البحث بعنوان دور حكومة قرية هارجاوينانجون في تطوير القطاع الزراعي في 2015 - 2019 ، مع صياغة المشاكل التالية: ما هو دور حكومة القرية في تطوير القطاع الزراعي في قرية هارجاوينانجون؟ هل هناك معوقات وعوامل داعمة في القيام بدورها نحو تنمية القطاع الزراعي؟. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية مع منهج دراسة الحالة ، وهي دراسة يستكشف فيها الباحث ظاهرة معينة في وقت وأنشطة معينة. جمع البيانات في هذه الدراسة استخدام تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. تم استخدام التحليل عبر ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة هي أن حكومة قرية Harjawinangun لعبت عدة أدوار في التنمية في القطاع الزراعي. شجعت حكومة القرية ، وتحديدًا رئيس القرية ، المزارعين القرويين من خلال الملاحظات التي أدل بها من خلال الأنشطة المجتمعية مثل الاحتفال لأعياد التي يقيمها المجتمع. ومع ذلك ، فإن الدور الذي يتم القيام به لم يظهر الأمل في التنمية في القطاع الزراعي بشكل صحيح ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المشاكل التي يواجهها المجتمع في القطاع الزراعي. لم يتم تنفيذ برامج محددة في 2015 - 2019 في القطاع الزراعي كتحسين في جودة المزارعين الريفيين مثل برامج تنمية المجتمع في الزراعة من خلال التدريب أو المشورة. تم تطوير البنية التحتية في القطاع الزراعي بعدة طرق لدعم الأنشطة المجتمعية في القطاع الزراعي مثل الطرق والجسور وورصف الأزقة في قرية هارجاوينانجون ، ويهدف التطوير إلى تسهيل قيام المجتمع بنشطته. ومع ذلك ، فإن بناء مرافق البنية التحتية هذه لم يحل المشاكل الزراعية التي يواجهها سكان قرية هارجاوينانجون. كما هو معروف ، فإن أكبر مشكلة في الأنشطة الزراعية هي الري. تم التخطيط لتطوير الري من قبل حكومة القرية وسيتم تنفيذه في 2020 أو 2021. يمثل عامل التمويل عقبة أمام حكومة قرية Harjawinangun لتنفيذ التنمية في مختلف القطاعات. البناء الذي تم تنفيذه للتو هو بناء الجسور والطرق والصرف الصحي وورصف الأزقة.

الكلمات الدالة : وظيفة. تطوير. حكومة القرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBINGBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Peneliti.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	12
H. Analisis Data.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Peran.....	17
1. Pengertian peran.....	17
2. Peran pemerintah desa.....	18
B. Teori Pembangunan.....	26
1. Pengertian pembangunan.....	26
2. Pelaksanaan pembangunan desa.....	30
BAB III LANSKAP DESA HARJAWINANGUN	
A. Gambaran Umum Desa Harjawinangun.....	35
1. Sejarah Desa Harjawinnangun.....	35
2. Kondisi Geografis.....	37
3. Jumlah Penduduk.....	38
B. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi.....	40
1. Kondisi Sosial Budaya.....	40
a. Pendidikan.....	40
b. Agama.....	43
2. Kondisi ekonomi.....	45

C. Kondisi Pemerintahan Desa Harjawinangun	47
BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DAN FAKTOR KENDALA SERTA FAKTOR PENDUKUNG.	
A. Strategi Kebijakan Pembangunan Desa Harjawinangun Tahun 2015 – 2020	49
B. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Di Sektor Pertanian	52
1. Pembinaan Masyarakat di Sektor Petani	52
2. Pelayanan Terhadap Masyarakat Petani	56
3. Pembangunan Sarana Prasarana Sektor Pertanian.....	57
C. Implementasi Teori	59
D. Faktor Pendukung Dan Faktor Kendala.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Foto Peta Desa Harjawinnagun
Tabel II	: Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Harjawinangun
Tabel III	: Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Harjawinangun
Tabel IV	: Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tabel V	: Data Lembaga Pendidikan di Desa Harjawinangun
Tabel VI	: Data Tempat Ibadah di Desa Harjawinangun
Tabel VII	: Daftra Mata Pencaharian Penduduk Desa Harjawinangun
Tabel VIII	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Harjawinangun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan mungkin saja sudah sangat familiar ditelinga kita. Pengertian pembangunan. Menurut arif budiman (1995) pembangunan merupakan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju. Dalam hal ini kemajuan dimaksud kemajuan material, maka dari itu pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi. Upaya pembangunan merupakan upaya untuk membangun ekonomi mandiri seperti apa yang dicita citakan negara indonesia supaya bisa bersaing dengan negara lain. Pembangunan disegala bidang dilakukan pastinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar tercapai cita cita masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.(Bahri: 2019)

Pelaksanaan pembangunan di indonesia, dilihat dari teori pembangunan dunia ketiga arif budiman (1995) tentang ukuran pembangunan jelas bahwa di Indonesia belum mencapai pembangunan yang optimal. Ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan terutama pembangunan didaerah pedesaan dan daerah perkotaan. Ditandai didaerah perkotaan dalam segi sarana prasarana lebih baik dan maju dibanding didaerah pedesaan. Padahal daerah pedesaan memiliki kekuatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan pedesaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Peran penting daerah pedesaan harusnya dapat menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berharga untuk menjamin kelestarian mata pencaharian masyarakat pedesaan serta didorong dengan dukungan

pemerintah daerah melalui pembangunan yang berkesinambungan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(heri:2009:01)

Dilahirkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini menjadi lebih besar. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan, keleluasan kepada tiap - tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan diberbagai sektor berdasarkan potensi daerahnya. Akan tetapi semenjak diberlakukanya otonomi daerah sampai sekarang, masih ada daerah yang belum mewujudkan masyarakatnya sejahtera, padahal melihat potensi daerah memungkinkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.(didi:tth: 8)

Penerapan otonomi daerah seharusnya menjadi dampak pendorong perubahan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan sistem pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karna dalam perundang undangan tersebut diberikan kewenangan pemerintah daerah dalam proses pembangunan diberbagai sektor sesuai potensi yang ada. Dalam hal ini menunjukan Peran pemerintah daerah merupakan hal yang mutlak menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan didaerahnya, karna dalam paradigma good governance pemerintah daerah mempunyai peran sangat penting dalam membangun daerahnya (Roikhatun:2015: 04). Selain itu berdasarkan undang- undang tersebut tentang pemerintah daerah pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa daerah kecamatan/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Dengan lahirnya UU Desa No 6 tahun 2014 tentang desa, dalam hal ini pemerintah desa mempunyai payung tersendiri untuk mengatur desaanya sendiri.

Didalam UU Desa No 6 tahun 2014. “ Desa adalah desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”. Serta “ Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan artian tersebut pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengatur serta mengurus desanya. Salah satu kewenangnya yaitu tentang pembangunan desa seperti yang termaktub dalam UU desa Bab IV pasal 18 “ kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa, dan adat istiadat desa”. Selain itu dalam pasal 19 dijelaskan bahwa salah satu kewenangan desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Menurut Didik Sukrino (2010) kewenangan asal usul desa mencakup pengelolaan asset desa, seperti pengelolaan sumber daya alam. kewenangan ini mengisyaratkan bahwa desa dapat melakukan pembangunan desanya sesuai dengan potensi yang ada didesa (Irma dkk : 2017 : 47)

Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, Harjawinangun termasuk dalam kategori desa yang dimaksud. Desa tersebut mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahnya sendiri. Desa Harjawinangun mempunyai visi dan misi yaitu : “Terbangunya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera ” misi : 1.melakukan penataan kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat. 2 menyelenggarakan pemerintah yang bersih ,terbuka dan bertanggung jawab dari bentuk bentuk

penyelewengan yang lainnya serta sesuai dengan peraturan perundang undangan. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa. 3 mengoptimalkan jalan desa, jalan lingkungan gang, sarana air bersih, saluran perairan, jambanisasi, sarana keagamaan dan pendidikan serta infrastruktur lainnya. menjadikan masyarakat desa harjawinangun yang nyaman dan bermartabat. 4 meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. 5 meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus pada petani dan industri rumahan. Visi dan misi merupakan tujuan atau cita – cita suatu lembaga yang ingin dicapai, dilihat dari visi tersebut bahwa kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa harjawinangun (Renstra desa Harjawinangun tahun 2020 - 2025).

Desa Harjawinangun merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan balapulang kabupaten tegal, jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan \pm 6 km. Desa Harjawinangun merupakan desa yang memiliki luas wilayah 200 Ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi : persawahan 130 ha, hutan 8 ha, kuburan 2 ha dan pemukiman serta pekarangan 60 ha dan memiliki jumlah penduduk desa sebanyak 5,784 orang, terdiri dari 2,907 Laki – laki dan 2,877 perempuan. Selain itu sebagian penduduk desa Harjawinangun memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani (Data Demografi/ Monografi Desa Harjawinangun tahun 2020). Dilihat dari luas wilayah dan mata pencaharian masyarakat di desa Harjawinangun, lebih dari setengah wilayah desa menjadi wilayah persawahan serta masyarakat desa harjawinangun memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, menjadikan dua faktor tersebut sebagai asset desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia didesa. Sesuai UU Desa No 6 tahun 2014 pasal 78 poin 1 menjelaskan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan atau berkesinambungan sehingga sumber daya lokal yang dimiliki menjadi keistimewaan desa (irma dkk : 2017: 48). Selain itu peran serta fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa sangat penting untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang ada. Peran disini sebagai peran pemerintah desa dalam memberdayakan potensi sumber daya yang ada di desa harjawinangun kecamatan balapulang kabupaten tegal untuk membangun masyarakat lebih baik lagi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui pembangunan desa diberbagai sektor salah satunya di sektor pertanian (firyal dkk: 173).

Musim kemarau yang seringkali menimpa Indonesia mengakibatkan permasalahan kekeringan di sebagian pelosok negeri. Di desa Harjawinangun salah satu desa yang masyarakatnya merasakan hal itu. Setiap musim kemarau datang, masyarakat desa tidak bisa terlepas dari permasalahan – permasalahan kekeringan. Akibatnya kebutuhan pertanian mengalami permasalahan, para petani desa Harjawinangun tidak bisa memanfaatkan lahan sawah mereka untuk ditanami karena kekurangan air. Padahal sawah menjadi potensi sumberdaya alam desa yang bisa dikembangkan serta menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga berpotensi untuk mewujudkan pembangunan desa yang optimal seperti apa yang telah diatur dalam UU desa No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat desa yang tidak bisa memanfaatkan atau memberdayakan lahan pertanian. Masyarakat desa hanya bisa memanfaatkan lahannya dengan berpatokan pada musim penghujan saja, padahal musim di Indonesia pada saat ini sulit sekali diprediksi. Kekurangan air pada saat musim kemarau bukan hanya satu – satunya permasalahan di sektor pertanian di desa Harjawinangun, permasalahan saluran irigasi yang belum

tertata dengan baik juga menjadi permasalahan bagi masyarakat desa, kurang meratanya pembangunan irigasi di desa menjadi kendala di bidang pertanian. Irigasi yang digunakan masyarakat di desa Harjawinangun kecamatan Balapulang kabupaten Tegal masih terbilang tradisional, masyarakat menggunakan selang plastik untuk mengairi pertanian yang hanya mengandalkan kekuatan tekanan debit air untuk dapat mengalir. Selain itu minimnya irigasi sumber juga menjadi masalah yang menimbulkan konflik masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat petani diakibatkan minimnya irigasi sumber yang sulit didapat.

Dilihat dari uraian di atas peran pemerintah desa sangat penting untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal pembangunan desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta mengembangkan potensi desa sesuai amanah perundang undangan yang berlaku. Peran pemerintah desa dalam hal ini penting baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Peran pemerintah yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga yakni : Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah yang dapat memfasilitasi kebutuhan untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat di bidang pertanian . Peran pemerintah sebagai motivator yaitu peran pemerintah menjadi pendorong pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan baik. Yang terakhir peran pemerintah sebagai mobilisator yaitu peran yang dilakukan sebagai pengarah dan penggerak kegiatan -kegiatan di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dengan melakukan tindakan nyata dalam memanfaatkan potensi desa yang ada.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti persoalan di desa Harjawinangun kecamatan Balapulang kabupaten Tegal dengan mengangkat judul tentang “Peran Pemerintah Desa terhadap Pembangunan di Sektor Pertanian pada tahun 2015- 2019 di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang dirumuskan adalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian di Desa Harjawinangun Balapulang kabupaten Tegal?
2. Adakah kendala dan faktor pendukung dalam menjalankan peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian di Desa Harjawinangun Balapulang Tegal.
2. Untuk mengetahui mengenai faktor kendala atau pendukung dalam menjalankan peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian didesa Harjawinangun.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian. Manfaat penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bermanfaat bagi peneliti selanjutnya pada umumnya, serta di jurusan ilmu politik khususnya yang berfokus pada kajian peran pemerintah desa dalam pembangunan desa.
2. Manfaat praktis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pelaku politik pemerintahan desa yang berharga dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Harjawinangun Balapulang Tegal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi prasyarat mendapatkan gelar sarjana ilmu politik.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penelitian yang diajukan peneliti merujuk pada penelitian – penelitian terdahulu sebagai berikut :

Febry Nur Fauzi. 2018. Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian ini bahwa partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur terletak pada perencanaan pembangunan Desa Widodomartani tahun 2018. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur adalah pembangunannya itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan. Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah terletak pada penggunaan peran pemerintah desa. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti ajukan adalah lokasi penelitian yang diteliti . Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang *Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta*” Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi terdahulu tersebut.(Febry:2018)

Fajar Ferdiansyah, 2019 . Skripsi tentang “ Politik Pembangunan (Studi terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana peran nurdin halid dalam pembangunan kawasan industri. Serta bagaimana politik pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, serta untuk mengetahui Apa implikasi politik pembangunan Kawasan Industri Bantaeng terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembangunan kawasan industri supaya mengalami peningkatan. Nurdin abdulloh sebagai bupati menyatakan bahwa peningkatan akan berbentuk seperti kerjasama dengan investor – investor. Politik pembangunan yang dilakukan pemerintahan mendapat dukungan dari masyarakat. Peran serta bupati dalam hal ini cukup baik dalam melakukan pembangunan kawasan industri. (Fajar: 2019)

Dendi Haryadi, 2018. Artikel tentang “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015”’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepaladesa dalam pelaksanaan pembangunan di desa mantang lama kecamatan mantang kabupaten bintan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa peran kepala desa sudah cukup baik dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi permasalahan timbul yang menjadi kendala yaitu kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. (Haryadi : 2018)

Terien Telenggen. dkk. 2019. Artikel tentang “*Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Dikelurahankarombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*” . artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Kelurahankarombasan kecamatan wanea kota manado melalui fungsi pemerintahan sebagai fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif serta fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan

masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah kelurahan sudah melakukan peran dengan baik. Lurah sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan telah melakukan beberapa fungsinya dengan baik. Implementasi pembangunan yang direncanakan juga berjalan dengan baik berkat lurah melaksanakan beberapa fungsi tadi. (Terien.dkk: 2019)

Irma Fitriana.dkk. Artikel tentang “ *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata Di Desa Bumiaji Kota Batu Jawa Timur* “. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian dilakukan untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan Von Stoker mengenai 3 aspek penting dalam pembangunan yaitu aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial. Hasil penelitian bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah mencakup tiga aspek tersebut. Dilihat dari manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar yang lebih baik. (Irma. Dkk: 2017)

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan diajukan berbeda dengan penelitian tersebut. Secara garis besar perbedaaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang diajukan terdapat pada lokasi penelitian serta beberapa teori yang digunakan berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan di gunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menyajikan pemaparan dan penjelasan yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan obyek masalah yang diteliti (Sugiono , 2008 :45). Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah serta peneliti dalam mengumpulkan data mengacu pada pandangan objek yang dikaji. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang lebih menekankan pada tujuan atau substansi.

Lexy J Moleong, (2007: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Bentuk data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan data tersebut menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi teori.

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Lexy J Moleong (2007: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Penelitian pendekatan kualitatif mengacu pada latar dan individu secara utuh. Prosedur penelitiannya bersifat mengartikan, menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Sedangkan jenis pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab “bagaimana” dan mengapa dalam suatu fokus penelitian (Yin : 2002 dalam Suryanto. Dkk :2018:128). Pendekatan ini juga dapat digunakan dalam beberapa konteks permasalahan yang lebih luas. Misalnya digunakan ketika untuk menjelaskan job insecurity pada pemerintahan desa, tentang bagaimana peran serta fungsi dalam masyarakat untuk menangani suatu masalah yang terjadi dimasyarakat (Hartly, 2004 dalam Suryanto. Dkk : 2018 :129).

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan data yang didapat dari hasil penelitian , pengamatan, riset dari suatu objek. Jenis data sesuai dengan cara memperolehnya terbagi menjadi 2 yaitu (Putra:2020).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh orang atau lembaga yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data didapat salah satunya melalui wawancara kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini dipilih dengan

mendasari pada objek yang menguasai permasalahan serta bersedia memberikan informasi data. wawancara dilakukan kepada narasumber dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti dalam penelitian mengenai peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. wawancara dilakukan dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Harjawinangun, dan Badan Pengawas Desa. perangkat desa. serta tokoh masyarakat dan masyarakat petani.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada dari sumber lain yang telah ada. Data ini berbentuk dokumen yang didapat berupa jurnal, buku - buku, serta dokumen – dokumen yang sudah ada ditempat penelitian untuk dijadikan referensi-referensi yang menjadi panduan dalam penelitian. Data yang digunakan tentunya data yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara peneliti melakukannya dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan.

Sugiyono (2016: 231) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Perekaman dilakukan saat dilangsungkan wawancara mendalam. Melalui teknik wawancara maka peneliti mendapat informasi langsung dari informan yang terdiri dari: Kepala Desa Harjawinangun selaku pemangku jabatan tertinggi di pemerintahan desa, Sekretaris Desa Harjawinangun, wawancara juga dilakukan kepada beberapa perangkat desa, serta Kepala BPD Desa Harjawinangun. Selain itu tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani juga akan dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke Desa Harjawinangun untuk melihat secara langsung bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian pada tahun 2015 – 2019 di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian (Djaman : 90: 2017). Observasi dilakukan peneliti mulai dari kondisi sarana prasarana yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian serta aktifitas masyarakat desa Harjawinangun dalam melaksanakan aktifitas pertaniannya dan kondisi lahan persawahan di desa harjawinnagun.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2016: 240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak desa Harjawinangun untuk mendukung Penelitian ini. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan mengenai peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian pada tahun 2015 – 2019 di desa Harjawinangun kecamatan Balapulang kabupaten Tegal. Dokumen – dokumen tersebut berupa profil desa harjawinangun, Buku rencana strategis pembangunan desa Harjawinnagun tahun 2015 – 2019, laporan – laporan pembangunan desa tahun 2015 – 2019 desa Harjawinangun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembangunan desa harjawinnagun disektor pertanian..

4. Triangulasi

Menurut Sugyono (2016: 241) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Dalam menggunakan teknik triangulasi peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.

H. Analisis Data

Analisa data merupakan cara peneliti mengelolah hasil data yang sudah didapat dapat untuk dijadikan kesimpulan dalam penelitian. Karena data yang telah diperoleh peneliti tidak bisa langsung disajikan begitu saja. Analisi data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikandata, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, , mencari dan menemukan pola danmemutuskan apa yang dapat

disampaikan kepada orang lain (Moleong: 2007: 248). Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Adapun proses analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan meliputi (Sugiono:2016:252).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses penyederhanaan data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memfokuskan data pada hal- hal penting. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan keseluruhan bagian-bagian dari penelitian, dengan membuat secara deskriptif, naratif, matrik, bagan, tabel dan sebagainya mengenai data yang diteliti sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2016: 252) Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-akibat. Kesimpulan awal bersifat sementara sebelum dibuktikan dengan bukti yang kuat.

Analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara mengonfirmasi data dengan teori – teori politik yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu teori yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan

kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk menjadikan penelitian lebih kuat serta dipercaya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memudahkan penyajian penelitian yang dilakukan peneliti, penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Rangkaian tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam penelitian.

BAB II, LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori peran serta teori pembangunan yang berkaitan dengan judul penelitian tentang Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan disektor pertanian pada tahun 2015 – 2019 di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

BAB III.. LANSKAP DESA HARJAWINANGUN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang letak geografi dan demografi desa, kondisi sosial budaya dan ekonomi di desa harjawinangun kecamatan balapulang kabupaten tegal yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah hasil dan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian mengenai bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan sektor pertanian pada tahun 2015 – 2019 di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal serta bagaimana kendala dan faktor pendukung dalam menjalankan peran pemerintah desa terhadap pembangunan disektor pertanian.

BAB V. KESIMPULAN

Pada bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil akhir penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya terhadap organisasi maupun lembaga yang didudukinya. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajiban - kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran sangat penting karena untuk dapat mengatur suatu kegiatan (Septiyana :2017). Peranan memiliki 3 hal yang kemukakan oleh Soekanto. **Pertama**, peranan merupakan norma – norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam artian peranan merupakan serangkaian kebijakan - kebijakan atau peraturan – peraturan yang mengarahkan seseorang terhadap kehidupan masyarakat. **Kedua**, peranan diartikan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi. **Ketiga**, peranan merupakan perilaku tindakan individu yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat (Jenifer dkk : th : 2018).

Menurut Toha (2003 : 263) dikutip dari Nopel (2015 : 825). “ suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Dapat diartikan berdasarkan pengertian peran yang di kemukakan diatas bahwa peran merupakan suatu keahlian bagi individu yang harus dimiliki dalam menjalankan kedudukan disebuah lembaga atau organisasi di masyarakat sesuai dengan situasi tertentu untuk mewujudkan

aktivitas atau kegiatan, sehingga kegiatan – kegiatan atau aktifitas yang dilakukan berjalan dengan maksimal. Berdasarkan pengertiannya peranan merupakan keterlibatan seseorang atau lembaga atau organisasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang dapat dipahami adalah keterlibatan maupun peran menjadi tugas dan fungsi individu maupun lembaga yang harus dilaksanakan. Semakin tinggi kedudukan atau keberadaan dan fungsi orang maupun lembaga tersebut di masyarakat semakin tinggi pula peranan yang menjadi tuntutan untuk bisa dilaksanakan, karena sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kehadiran seseorang atau lembaga ditengah – tengah masyarakat.

Dengan memahami beberapa pengertian peranan diatas bahwa peranan dapat diartikan sebagai fungsi dan kedudukan seseorang dimasyarakat, artinya suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi kedudukan dalam masyarakat akan menentukan statifikasi sosialnya dimasyarakat. Serta peranan menjadi hak dan kewajiban seseorang atau lembaga dalam menjalankan perannya, bagaimana dampak yang dihasilkan setelah seseorang atau lembaga melaksanakan perannya dimasyarakat. Selain itu peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi jabatan dalam sistem sosial (Nopel : 2015: 826).

2. Strategi Peran

Strategi dapat diartikan sebagai cara untuk mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan untuk membangun visi dan misi organisasi. Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, strategi adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu (2) rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi

sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut *BussinesDictionary*, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah, strategi juga adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Menurut *B.N. Marbun*, (2003 : 341) bahwa “Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun (Langi : 2015).

3. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Undang Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 25 bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa dan dibantu perangkat desa lainnya. Pemerintah desa mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Fungsi secara singkat memiliki arti sebagai perincian dari tugas pokok. Tugas pokok lembaga sebagai derivation dari fungsi – fungsi pemerintah karena sesuatu lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi – fungsi untuk melakukan sebgaiian tugas pokok pemerintah secara keseluruhan (Nopel : 2015 : 827). Berbicara mengenai fungsi, menurut A.W. Widjaja (1996 : 22) dalam Nopel (2015: 827) kepala desa dengan nama lain sesuai peraturan perundang undangan yaitu pemerintah, memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Melaksanakan kegiatan terhadap rumah tangganya sendiri
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. Dalam melaksanakan tugasnya.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan setiap program strategis pembangunan dalam upaya memperkuat desa serta langkah mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera sebagai tujuan otonomi daerah (Jenifer dkk : tth : 2018). Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan lebih berkembang dan maju apabila didasari dengan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan – peraturan yang ada serta ditunjang dengan prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah desa memiliki asas – asas yang harus dilakukan sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang undangan meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektifitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Hal ini sangat diperlukan untuk dapat memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat dimana dalam perkembangan yang ada saat ini diperlukanya peran pemerintah guna membawa pembangunan kearah kemajuan yang lebih baik (fauziah : 1212: 2015).

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. perangkat desa mempunyai fungsi untuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan wewenang serta fungsinya.jumlah perangkat desa menyesuaikan kebutuhan didalam pemerintahanya. Kepala desa serta perangkatnya memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. sehingga dengan adanya peranan tersebut menjadikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya dan tindakan dari pemerintah desa yang optimal (fauziah : 1212: 2015)

Menurut Tjokroamindjojo (2000) dikutip dari (Anggi:1098 : 2013) Peran pemerintah desa dapat dibagi menjadi beberapa peran yaitu : Peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai motivator, peran

pemerintah sebagai mobilisator. Lebih rinci mengenai peran pemerintah dijelaskan sebagai berikut:

a. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator. Merupakan peran yang dilakukan pemerintah desa sebagai narasumber yang baik untuk menentaskan permasalahan – permasalahan yang dihadapi masyarakat. Serta dapat memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat sehingga memudahkan dan memperlancar kegiatan yang dilakukan. Usaha – usaha pemenuhan kebutuhan ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan perekonomian masyarakat. Fasilitas – fasilitas yang diberikan bermacam – macam bentuknya seperti berupa program yang ditujukan untuk kebutuhan kegiatan yang berhubungan maupun penyediaan anggaran yang disediakan untuk menyediakan peralatan yang mendukung untuk berlangsungnya kegiatan.

b. Motivator

Peran pemerintah desa sebagai Motivator. Merupakan peran yang dilakukan pemerintah desa untuk menyemangati dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang baik, sehingga tujuan pembangunan tercapai, dan suatu saat pembangunan yang dilakukan menjadi penopang perekonomian yang baik serta menjadi suatu keistimewaan desa.

c. Mobilisator

Peran Pemerintah sebagai Mobilisator, merupakan suatu peran yang dilakukan pemerintah sebagai pengarah sekaligus penggerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan yang berguna dimasyarakat secara merata. Pada hakekatnya pemerintah desa harus bisa mengajak masyarakat desa melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (Mahayana : 2013 : 403).

Menurut Munir (2010 : 19) dikutip dari (Murdiana asih dkk : tth : 266) sesuai fungsinya peran pemerintah dapat dijelaskan menjadi tiga peranan: peran pemerintah sebagai enterpreneur, peran pemerintah sebagai kordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator. Lebih jelasnya peran tersebut yaitu:

a. Enterpreneur

Peran pemerintah sebagai enterpreneur yaitu peran pemerintah untuk bertanggung jawab melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, pengelolaan aset – aset sumber daya ekonomi potensial yang ada didaerah kedudukannya, sehingga dapat memberikan keuntungan dan manfaat.

b. Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator yaitu peran pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah serta merangkul masyarakat untuk dapat berpartisipasi menjadi aktor dalam pembangunan yang dilakukan.

c. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan terhadap aktifitas masyarakat. Peran fasilitator dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional*, yaitu yang berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembagunan.

Selain itu Menurut Siagian pemerintah memainkan perananan yang dominan dalam pembangunan nasional yaitu peran sebagai stabilisator, innivator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Secara jelas peranan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Stabilisator

Peranan pemerintah yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang berdampak berubah menjadi gejolak sosial, apalagi dapat

menjadikan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara antara lain : kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, menggunakan pendekatan persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Inovator

Peranan pemerintah selaku innovator sebagai keseluruhan yang harus menjadi sumber dari hal - hal yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan perannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi.

c. Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara – negara lain. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan antara lain : penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimilikisehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistyem pendidikan nasional yang manusia yang bproduktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokrasi, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

d. Pelopor

Pelopor dalam pembangunan pemerintahan harus menjadi panutan (role mode) bagi seluru masyarakat . pelopor dalam hal – hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menengakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya, sosial dan kepeloporan demi kepentingan negara.

e. Pelaksana Sendiri

Peran pemerintah menjadi pelaksana sendiri dalam melaksanakan pembangunan karena mempertimbangkan keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, tidak diminati masyarakat dan secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta. Meskipun benar bahwa kegiatan pembangunan sebagai tanggung jawab secara nasional dan bukan berarti menjadi beban pemerintah saja. (Dortea dkk : 2017 :th)

Peran pemerintah desa sangat besar dan penting dalam hal menentukan program –program yang akan menjadi suatu kebijakan pembangunan desa untuk mendorong peningkatan masyarakat yang lebih sejahtera serta menentaskan suatu masalah yang terjadi disuatu desa yang dipimpinnya. peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan strata masyarakat. Peningkatan masyarakat sejahtera bisa dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan, Menentukan setiap program kebijakan pembangunan harusnya melihat dari potensi sumber daya desa yang bisa dikembangkan (Bahri : 2019: 88).

Program kebijakan pembangunan merupakan rencana operasional pelaksanaan tahunan yang berisi tentang program – program sektoral yang bertujuan untuk pencapaian suatu rencana yang diinginkan. Program yang baik akan mempunyai unsur – unsur pembaharuan kearah yang lebih baik. Program – program yang dirancang merupakan program yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada, keadaan – keadaan yang menjadi kelemahan – kelemahan dan hambatan – hambatan setiap kegiatan yang masyarakat lakukan. Selain itu menurut Tjokroamidjojo (1974) dikutip dari (Ita dkk : 891 : tth) suatu program yang baik harus memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Program memiliki tujuan yang jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek – proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin

- d. Pengukuran dengan ongkos – ongkos yang diperkirakan dan keuntungan – keuntungan yang diharapkan yang dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan – kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya diberbagai bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga kerja, pembiayaan, dan lain – lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dalam hal ini tentunya pemerintah desa memiliki peran atau andil bagaimana dalam membuat suatu kebijakan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di desa serta mengajak masyarakat untuk ikut melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan. Peran Pemerintah serta masyarakat sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan harus berkesinambungan dengan potensi swadaya yang ada, karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan yang ada diwilayahnya.

Keterlibatan peran masyarakat terhadap pembangunan merupakan wujud dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi tugas dan fungsi pemerintahan terhadap peran yang dilakukan. Menurut Wahyu dalam bukunya perubahan sosial dan pembangunan (2005 : 244) dikutip dari Nopel (2015:828) “Partisipasi adalah pengikut sertaan seluruh anggota masyarakat didalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri“. Dalam artianya partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa prinsip utama dalam upaya

mengembangkan pemberdayaan masyarakat dijelaskan menurut Drijifer dan Sajise (dalam Sutrisno: 2015 : 15) dikutip dari Ita dkk (tth : 892) ada lima macam yaitu :

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*). Dimana dalam fase perencanaan dan pengelolaan setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan.
- c. Keterpaduan. Yakni kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional memiliki keterpaduan.
- d. Keuntungan sosial dan ekonomi. Merupakan bagian dari program pengelolaan untuk dapat memberikan keuntungan dari segi sosial maupun ekonomi.

Beberapa prinsip diatas memberikan sebuah gambaran atau acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan. Sebab keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan desa sangat dibutuhkan serta menjadi tugas dan fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Menurut Conyers dikutip dari A. Mustanir dkk (2018 : 76) memberikan penjelasan mengenai mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Ada beberapa faktor yang menjadikan partisipasi masyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Conyers menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. **Pertama**, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. **Kedua**, masyarakat akan lebih percaya dengan proyek atau program yang dijalankan karena merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. **Ketiga**, merupakan suatu hak demokrasi bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan. Beberapa penjelasan diatas menggambarkan bahwa keikutsertaan masyarakat sebagai

bentuk partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan. Sebab pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai bentuk partisipasi sering dianggap tidak bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan dimasyarakat serta mengerti bagaimana cara mengatasi permasalahan mereka. Sukardi (2009: 44) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung adalah hak yang perlu dipenuhi karna akan mempengaruhi hasil dari pembangunan itu sendiri (Murdiana : tth: 266).

B. Teori Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan kunci dari segala hal dalam suatu negara. Pembangunan secara umum diartikan sebagai proses untuk memajukan kehidupan masyarakat salah satunya dalam mensejahterakan kehidupannya. Kemajuan dapat diartikan sebagai kemajuan dibidang perekonomian masyarakat yang meningkat. Pembangunan bukan lagi menjadi masalah bagi masyarakat kecil disuatu negara (Budiman:1995:1). Pembangunan dapat diartikan bahwa sebagai perubahan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa makna penting pembangunan berarti proses menuju perubahan, perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang sebelumnya dianggap tidak baik atau kurang baik menjadi sebuah kondisi yang lebih baik (Herman : 2020: 121) .

Paradigma pembangunan diindonesia diabad ke 21 memiliki tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki arti sebagai pembangunan yang dapat dimanfaatkan terus menerus dari generasi ke generasi dengan harapan serta tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan ini memiliki tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek ekologi, ekonomi dan aspek sosial. Ketiga aspek ini harus dipenuhi supaya pembangunan tidak mengalami kegagalan (Irma Dkk: 2017:49).

Dijelaskan oleh Suwarmo dalam Sugandy dan Hakim dikutip dari Irma. Dkk (2017: 48) bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan “perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya dan kegiatan dunia usaha”. Dapat diartikan bahwa pembangunan bisa tercapai dengan berhasil apabila memperhatikan aspek pembangunan serta peran pemerintah dan masyarakat dengan baik.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jelas bahwa disebutkan tentang pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Artinya, seluruh proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara sendiri terdapat dalam pembukaan undang – undang dasar 1945 alenia keempat yaitu : “ untuk merintis suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial “. Artinya, **Pertama**, bahwa pembangunan memiliki tujuan untuk melindungi secara menyeluruh masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. **Kedua**, pembangunan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. **Ketiga**, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan. **Keempat**, pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu pembangunan secara spesifik dijelaskan mengenai tujuan pembangunan yang terdapat pada UU Desa No 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan

kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memberantas kemiskinan. Pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan pembangunan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara berkelanjutan.

Pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di tiap – tiap daerah. Pembangunan memiliki arti sebagai kemajuan untuk meningkatkan keistimewaan daerah. Pembangunan juga merupakan bentuk dari perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kansil dalam (pattonn : 2005 : 60) dikutip dari (Jenifer dkk :th: 2018) mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik sering disebut dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang perlu disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari – hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sarana dan prasarana fisik atau disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting untuk sistem pelayanan masyarakat. Sarana dan prasarana fisik menjadi hal yang penting untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Pembangunan yang berkualitas dengan melihat kebutuhan akan menjadikan kesejahteraan dimasyarakat serta kemakmuran. Yang perlu diperhatikan adalah membangun harus didasari dengan kebutuhan dan saling berintegritas satu sama lain serta dapat dirasakan manfaatnya (Jenifer dkk

: th : 2018). Menurut Mubiyanto (1991 : 35) dalam Nopel (2015 : 830) menjelaskan bahwa pembangunan fisik merupakan pembangunan yang nampak secara nyata memiliki wujud serta dapat dilihat, indikator penjelas mengenai pembangunan fisik adalah: Prasarana penghubung, seperti jalan, jembatan. Prasarana produksi, merupakan prasarana yang menyangkut terhadap aktifitas ekonomi masyarakat seperti irigasi, tempat perdagangan pasar, sawah atau perkebunan. Prasarana sosial budaya, merupakan prasarana yang bersifat umum, seperti gedung sekolah, balai pertemuan, rumah ibadah, klinik kesehatan.

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan – pelatihan, penyuluhan, pembangunan non fisik juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan karna pembangunan fisik seperti fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung jika tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik tidak akan menjadikan hal yang optimal dalam kemajuan pembangunan desa.maka dari itu suatu kebijakan program pembanguan yang dilaksanakan harus berkesinambungan (Didi Djazuli dkk : 18 :2018).

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara teratur serta sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai hasil. Serangkaian perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, tertata, terprogram dan berkesinambungan mulai dari tahap identifikasi kebutuhan masyarakat sampai tahap penetapan program pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari situasi maupun keadaan sebelumnya (Anggi : 1099 : 2013).

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) adalah sebuah mekanisme perencanaan yang ada didaerah untuk mempertemukan usulan – usulan kebutuhan masyarakat (bottom up

planning) dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah (top down planing). Penyelenggaraan musrembang di desa bertujuan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang akan diperoleh dari tingkatan bawah sehingga menjadi suatu usul yang terpadu untuk dilaksanakan didesa dan kembali dibahas ketingkat kecamatan. Pelaksanaan Musrembang dari tingkatan bawah keatas mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, propinsi, hingga sampai ketingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Karena keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tidak kalah pentingnya dengan peran pemerintah (Ahmad Mustanir dkk : 74 – 75 : 2018).

Dilain sisi dalam penyusunannya, rencana pengembangan dan pembangunan desa mengacu pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang tangguh. Berikut dapat di lihat ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa bahwa :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

- c. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- g. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
- h. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

- i. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
- j. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- k. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
- l. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ketentuan – ketentuan diatas dibuat untuk memberikan cakupan perencanaan pembangunan yang bertujuan supaya rencana pembangunan yang ditentukan membuahkan hasil dan memberikan kemajuan – kemajuan serta menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi terhadap aktifitas masyarakat.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari faktor keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Perencanaan sendiri mempunyai faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktor pengaruh keberhasilan

perencanaan pembangunan dijelaskan oleh Bratakusumah (2004 : 15) dikutip dari Muchlas (2015 : 11 – 12) sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan

Faktor ini terbagi menjadi dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor lingkungan dari luar (eksternal) merupakan pengaruh yang datang dari luar wilayah atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Faktor dari dalam (internal) merupakan pengaruh yang terdapat didalam wilayah sendiri, unsur yang terdapat pada faktor ini adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, politik.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor ini merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia menjadi perencana pembangunan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menciptakan perencanaan pembangunan yang baik. Harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, sehingga membutuhkan pengetahuan yang luas. Unsur yang terdapat didalamnya adalah perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial ekonomi, dan perencanaan fisik dan infrastruktur.

c. Faktor Sistem

Faktor sistem yang digunakan dapat mempengaruhi suatu perencanaan pembangunan. Faktor sistem yang digunakan adalah aturan – aturan atau kebijana – kebijakan yang digunakan oleh daerah sebagai dasar landasan pelaksanaan perencanaan pembangunanya. Unsur yang terdapat didalam faktor ini adalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan.

d. Faktor Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Faktor ini dapat memberikan pengaruh dimana tidak hanya dari segi peralatan saja namun dapat juga adanya berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang lebih maju. Peralatan hanya menjadi salah

satu aspek yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiaensi.

e. Faktor Pendanaan

Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi suatu perencanaan pembangunan. Dalam hal ini pendanan memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktifitas.

Beberapa faktor yang dijelaskan diatas menjadi sebuah landasan bagi pelaksanaan pembangun. Supaya dapat memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan itu sendiri.

BAB III

LANSKAP DESA HARJAWINANGUN

A. Gambaran Umum Desa Harjawinangun

1. Sejarah Desa Harjawinangun

Menurut sejarahnya, desa Harjawinangun telah ada sejak masa penjajahan belanda, desa harjawinangun awal mulanya bernama putra winangun (putra artinya anak laki –laki dan winangun artinya membangun) jadi arti dari putra winangun adalah putra yang membangun. Selain itu desa harjawinangun juga disebut sebagai desa keputihan karena dahulu awalmulanya desa dihuni oleh leluhur yang hidup didesa sebagai pertapa suci dan sakti , ketika ada pengganggu didesa, mereka akan menjadi raksasa yang besar untuk melindungi desa. leluhur tersebut bernama, mbah maya duta. Selain mbah maya duta pada zaman peperangan melawan penjajah ada juga leluhur yang bernama. Mbah kutabinangun, mbah mangunsari, mbah kyai adeg, dan mbah bolot.

Sejarah desa sejak masa kemerdekaan tepatnya pada tahun 1945 ada pergantian nama desa yang sebelumnya putrawinangun menjadi desa Harjowinangun. Harjo artinya selamat dan winangun artinya membangun, dengan harapan desa ini terus selamat dari hal – hal yang negatif serta dapat membangun desa kearah yang lebih baik lagi. Akan tetapi dari nama harjowinangun beberapa masyarakat desa masih ada yang melafalkan harjawinangun dengan sebutan Trawinangun disebabkan karna pelafalan nama tersebut lebih mudah dan diingat.

Didalam sejarahnya desa harjawinangun setelah peperangan berakhir, masyarakat Harjawinangun mengadakan rapat untuk membahas tentang pemilihan kepala desa. rapat dilaksanakan dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan sesepuh desa untuk mengadakan pemilihan kepala desa. dan pada saat itu mendapatkan keputusan hasil kepala desa terpilih pertama adalah bapak Suhad Gandrung. Dalam perjalananya sampai saat

ini Desa Harjawinangun mengalami beberapa pergantian kepala desa. Berikut beberapa nama – nama kepala desa Harjawinangun dari tahun ke tahun yang terpilih:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Suhad Gandrung | : Masa pemerintahan tahun 1922 – 1926 |
| b. Djenab | : Masa Pemerintahan tahun 1927 – 1929 |
| c. H. Rifa'i | : Masa Pemerintahan tahun 1930 – 1942 |
| d. H. Baejuri | : Masa Pemerintahan tahun 1943 – 1946 |
| e. Abdulloh | : Masa Pemerintahan tahun 1947 – 1949 |
| f. Rajuki | : Masa Pemerintahan tahun 1950 – 1951 |
| g. Sumadi | : Masa Pemerintahan tahun 1952 – 1953 |
| h. Siryad | : Masa Pemerintahan tahun 1954 – 1955 |
| i. Abdulloh | : Masa Pemerintahan tahun 1956 – 1971 |
| j. Zainal Arifin | : Masa Pemerintahan tahun 1971 – 1976 |
| k. M. Susanto | : Masa Pemerintahan tahun 1977 – 1989 |
| l. Djaelani | : Masa Pemerintahan tahun 1990 – 1998 |
| m. Miftahudin | : Masa Pemerintahan tahun 1999 – 2006 |
| n. Djaelani | : Masa Pemerintahan tahun 2007 – 2012 |
| o. Moh.Badruzzaman | : Masa Pemerintahan tahun 2013 - Sekarang |

Setelah beberapa kali pergantian kepala desa. untuk periode pemerintahan 2019 – 2025 saat ini kepala desa terpilih yang memimpin desa yaitu bapak Moh. Badruzzaman. Terpilih dua kali menjadi kepala desa periode 2013 – 2019 dan periode 2019 - 2025. Pemerintahan yang dipimpin sudah berjalan sampai saat ini dengan perangkat desa yang sama dari periode kepemimpinan pemerintahan pertamanya.

Desa Harjawinangun setiap tahunnya mengalami perkembangan. Menjadi desa yang ramai penduduk dari tahun ketahun. Apalaiagi dengan banyaknya pendatang – pendatang yang ingin menetap didesa. Selain itu desa Harjawinangun juga memiliki potensi alam yang baik dan subur. Kesejahteraan masyarakat mulai meningkat setiap tahunnya dilihat dari rumah – rumah masyarakat desa yang mulai mencapai standar kesehatan dan keindahan.

Dalam perkembangannya, desa Harjawinangun tidak selalu lancar dalam menjalankan kegiatan atau aktifitas masyarakatnya. Permasalahan – permasalahan kekeringan yang datang mengakibatkan aktifitas masyarakat yang menimbulkan kekurangan produksi pangan, permasalahan ini terjadi pada waktu musim kemarau yang mengakibatkan lahan pertanian kering dan tidak bisa untuk dimanfaatkan menjadi lahan bercocok tanam serta penduduk desa sering mengalami paceklik karena gagal panen.

2. Kondisi Geografis

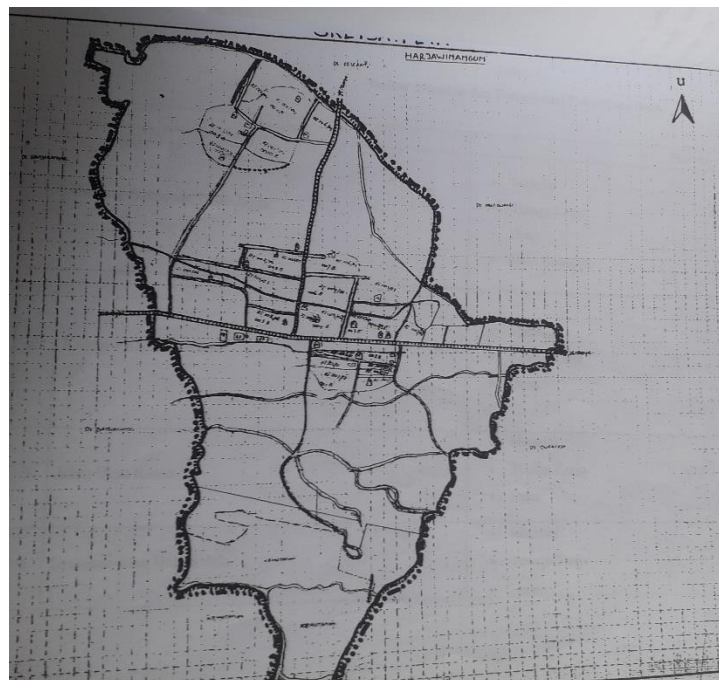
Desa Harjawinangun berada di wilayah kecamatan balapulang kabupaten tegal, luas wilayah desa Harjawinangun sesuai dengan data administrasi adalah 200 Ha dan memiliki ketinggian tanah rata - rata 350 meter diatas permukaan laut serta memiliki curah hujan yang sedang sekitar 2000 mm/m serta memiliki jumlah bulan hujan sekitar 6 bulan selama satu tahun dan memiliki suhu rata – rata 25 C – 29 C dengan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oleh sebab itu di Desa Harjawinangun luas wilayah dimanfaatkan paling banyak digunakan sebagai lahan pertanian karena tanahnya yang subur.

Desa Harjawinangun secara administrasi memiliki batasan – batasan wilayah, batas wilayah sebelah utara adalah desa Seseapan perbatasan antara desa ini dibatasi oleh sungai sehingga pemerintah daerah membangun jembatan, panjang jembatan sekitar 7 meter dan lebar 3 meter dengan harapan pembangunan jembatan bisa digunakan akses alternatif transportasi umum . batasan wilayah selatan adalah desa carul perbatasan antara desa tersebut dibatasi oleh perbukitan yang menjulang tinggi sehingga akses menuju desa tersebut harus memutar melewati desa batuagung. batasan wilayah barat adalah desa banjaranyar perbatasan antara desa dibatasi oleh sungai sehingga dibangunlah jembatan untuk akses alternatif transportasi jembatan yang dibangun sepanjang 7 meter dan lebar 4 meter karena jalan tersebut menghubungkan jalan utama antar desa menuju pusat

pemerintahan dan batasan wilayah timur adalah desa kalibakung perbatasan antara desa tersebut dibatasi sungai kecil.

Dilihat dari segi orbitasi, desa Harjawinangun memiliki jarak dari ibu kota kecamatan yakni 6 km, lama tempuh perjalanan dari desa menuju ke ibu kota kecamatan menggunakan transportasi darat selama kurang lebih 15 menit sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten sejauh 17 km dan lama perjalanan menuju ke ibu kota kabupaten sekitar kurang lebih 25 menit. Desa Harjawinangun secara kelembagaan terbagi menjadi 4 bagian yaitu Harjawinangun 1, Harjawinangun 2, Harjawinangun 3, Harjawinangun 4. (Buku Demografi Desa Harjawinangun tahun 2020).

TABEL 1.
PETA DESA



Sumber : Foto Dari Buku Administrasi Desa Harjawinnangun

3. Jumlah penduduk

Desa Harjawinangun secara administrasi tercatat memiliki jumlah total penduduk 5,784 jiwa . Dari jumlah tersebut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni jumlah penduduk laki – laki 2,907 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2,887 jiwa penduduk . Serta memiliki

1725 jumlah Kepala Keluarga. Berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	2,907
2	Perempuan	2,877
	Jumlah	5,784

**Sumber : Buku Administrasi Desa Harjawinangun tahun
2020**

Untuk melihat lebih jelas, mengenai jumlah penduduk di desa harjawinangun. Secara rinci jumlah penduduk disajikan menurut usianya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III
Penduduk Menurut Usia.

No	Kelompok Umur	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	0- 4 tahun	385	385	770
2	5- 9 tahun	254	254	508
3	10- 14 tahun	255	260	515
4	15 – 19 tahun	295	327	622
5	20-25 tahun	221	366	587
6	25 – 29 tahun	165	226	391
7	30 – 39 tahun	386	418	804
8	40 – 49 tahun	442	413	855
9	50 – 59 tahun	333	282	615
10	60 keatas	171	102	273
	Total	2907	2877	5784

Sumber : Buku Administrasi desa harjawinangun.

Berdasarkan usianya, mayoritas penduduk desa Harjawinangun didominasi usia produktif antara umur 15 – 50 tahun. Kelompok usia terbanyak

adalah penduduk yang berusia 40 – 49 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 855 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling sedikit menurut usianya adalah penduduk di usia 60 keatas dengan jumlah penduduk sebanyak 273 jiwa.

B. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya merupakan suatu keadaan sosial dan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat serta mempengaruhi situasi yang terjadi dimasyarakat. Kondisi sosial yang terjadi di desa harjawinangun dipengaruhi oleh beberapa keadaan, mulai dari keadaan pendidikan, agama, serta ekonomi yang terjadi didesa Harjwinangun.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang mumpuni masyarakat secara langsung maupun tidak langsung nantinya akan meningkatkan strata sosial kehidupannya dan dengan cepat dapat merubah pola pikir yang lebih maju. Upaya wajib belajar sembilan tahun merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat indonesia dengan negara lain dalam hal tuntutan di dunia kerja. Selain itu dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat pastinya akan berdampak pada pembangunan secara nasional.(Basrowi : 65 : 2010)

Tingkat pendidikan di desa Harjawinangunsudah cukup baik dalam perkembangannya. Akan tetapi dilihat dari data yang ada menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Dari jumlah penduduk desa Harjawinangun yang terdata sebanyak 5,784 jiwa, sesuai data menurut pendidikanya masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali sebanyak 258 orang dan berdampak pada penduduk yang

tidak bisa membaca dan menulis. Berikut data jumlah penduduk desa berdasarkan tingkat pendidikannya.

TABEL VI
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD / MI	515
2	TK / Play group	286
3	SD / MI	1015
4	SMP / MTS	1677
5	SLTA / SMA	1958
6	S1/Diploma	75
7	Buta Huruf	258

Sumber : Buku Administrasi desa Harjawinangun

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 515 jiwa tidak tamat sekolah dasar akan tetapi sebanyak 515 masih mendapatkan ilmu dari pendidikan yang dijalannya walaupun tidak tamat dijenjang ini. Sebanyak 286 jiwa masih tergolong anak – anak dibawah umur 6 tahun yang masih dalam perjalanan pendidikannya. Sebanyak 1015 jiwa masyarakat ditingkat pendidikan sekolah dasar sederajat, terbagi menjadi yang sudah tamat akan tetapi tidak melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya dan sebagian masih dalam proses pendidikan. Sedangkan sebanyak 1677 jiwa penduduk masyarakat mengenyam pendidikan SMP / MTS terbagi menjadi dua yakni yang sudah tamat tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sedang dalam proses pendidikan. Yang terbanyak dari beberapa klasifikasi menurut jenjang pendidikannya yakni mengenyam pendidikan SMA / MA sederajat, sebanyak 1958 jiwa, terbagi menjadi dua bagian yakni yang sedang menjalankan pendidikannya sampai saat ini dan yang sudah tamat dijenjang pendidikan ini, banyak penduduk yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi dikarenakan ekonomi. Banyak penduduk desa setelah tamat di tingkat pendidikan

sekolah menengah atas memilih untuk bekerja di luar kota (Merantau). Pekerjaan yang mereka lakukan bermacam – macam, dari mulai berdagang nasi goreng, berdagang martabak serta menjadi karyawan pabrik.

“Penduduk desa Harjawinangun memiliki pendidikan yang beragam. Lulusan sekolah dasar banyak dari golongan penduduk yang usianya sudah tua. Sedangkan kebanyakan penduduk desa yang lulusan sekolah menengah atas itu penduduk desa yang memiliki usia rata – rata muda saat ini. Perkembangan mutu pendidikan setiap tahunnya di desa harjawinangun sudah cukup baik.” (Wawancara. Erlina. 8 oktober 2020).

Selain tingkat pendidikan penduduk desa. di desa Harjawinangun sebenarnya sudah memiliki lembaga pendidikan yang mumpuni untuk melaksanakan program pemerintah mengenai wajib belajar sembilan tahun. Lembaga pendidikan berada di wilayah desa yang strategi sangat mudah dijangkau. lembaga pendidikan yang ada di desa Harjawinangun terbagi menjadi dua yakni : lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan agama. Lembaga pendidikan formal yaitu taman kanak – kanak, sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah keatas tersedia di desa Harjawinangun. Untuk lembaga pendidikan agama terdapat Taman Pendidikan Al Qur’an dan Madrasah Diniyah Awaliyah serta Madrasah Diniyah Wustho. Ketersediaan lembaga pendidikan di desa Harjawinangun cukup membantu masyarakat dalam hal meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Secara keseluruhan lembaga pendidikan formal di desa berstatus swasta yang sudah terakreditasi. Berikut tabel lembaga pendidikan yang ada di desa Harjawinangun.

TABEL V

Lembaga Pendidikan

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	TK / PAUD	4 BUAH
2	SD/ MI	3 BUAH

3	SMP/ MTS	2 BUAH
4	SMA/MA	2 BUAH
5	TPA/TPQ	5 BUAH
6	MDA/MDW	4 BUAH

Sumber : Buku Administrasi Desa Harjawinnagun

Berdasarkan data diatas lembaga pendidikan yang berada didesa Harjawinangun sudah cukup baik, karena mulai dari pendidikan agama serta pendidikan formal kanak – kanak sampai menengah keatas tersedia. Dengan adanya lembaga pendidikan yang dekat tentunya penduduk desa sangat terbantu dibidang pendidikan karna tidak perlu jauh – jauh untuk menyekolahkan anak – anaknya yang tentunya akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Dengan adanya lembaga pendidikan yang dekat memungkinkan biaya pendidikan akan lebih murah.

“ Keberadaan lembaga pendidikan didesa harjawinangun cukup membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dimasyarakat karena masyarakat tidak perlu jauh – jauh untuk menyekolahkan anaknya. Serta ketika masyarakat menyekolahkan anaknya didesa, memungkinkan pembiayaan akan lebih sedikit yang dikeluarkan sehingga keberadaan lembaga pendidikan didesa harjawinangun cukup membantu”. (wawancara. Erlina. 8 oktober 2020)

Seperti yang dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan pondasi dalam pembangunan secara nasional serta dapat meningkatkan mutu masyarakat dalam persaingan di dunia kerja. Keberadaan lembaga – lembaga pendidikan dan sumber belajar akan memberikan dampak positif terhadap semangat dan perkembangan generasi muda (Basrowi : 2010 ; 62).

b. Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan bagi manusia. Di desa Harjawinangun secara keseluruhan penduduk desanya beragama islam. Organisasi masyarakat yang melakat di desa Harjawinangun ada dua yakni

Nahdlotul ulama dan Muhammadiyah. Banyak tokoh – tokoh ulama di desa harjawainangun dari organisasi Nahdlotul Ulama maupun Muhammadiyah. Perbedaan antar pengikut organisasi masyarakat yang ada di desa Harjawinangun tidak berdampak negatif atau konflik beragama. Serta tidak berpengaruh terhadap kegiatan sosial budaya atau aktifitas di masyarakat. Tidak ada perbedaan perlakuan atau sikap penduduk desa walaupun berbeda organisasi masyarakat yang mereka ikuti. Di Desa Harjawinangun memiliki tempat ibadah hanya masjid dan mushola karena keseluruhan penduduk desanya beragama islam. Jumlah tempat ibadah ada 22 buah. Berikut rincian tempat ibadah dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel VI
Tempat Ibadah Penduduk Desa

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Musholah	19 Buah
	Total	22 Buah

Sumber : Buku Administrasi Desa Harjawinnangun

Tradisi keagamaan yang terus di pertahankan sampai saat ini adalah tradisi slametan ketika ada orang yang meninggal selama tujuh hari berturut – turut sehabis waktu solat isya yang hanya dihadiri bagi penduduk laki – laki saja dan ketika sudah menginjak 40 hari kematian akan ada tradisi slametan yang bisa disebut “matang puluh” waktu pelaksanaannya biasanya malam hari sehabis waktu solat isya dan menginjak 100 hari kematian juga diadakan slametan yang biasa disebut “Nyatus”.

Selain tradisi keagamaan slametan saat ada kematian, penduduk desa secara rutin melaksanakan tradisi tahlilan setiap satu minggu satu kali tepatnya pada hari kamis malam jum’at bagi penduduk laki – laki, dilaksanakannya tradisi ini setiap malam hari setelah solat mahrib. Untuk pembagian pelaksanaan tahlilan dimasing masing jam’iyah masjid atau

musholah serta tempat tahlilan bergilir dari satu rumah kerumah penduduk yang lain. Tradisi bagi penduduk perempuan yaitu jam'iyahan setiap hari jum'at siang setelah waktu dhuhur. Pelaksanaannya dibagi setiap jam'iyah yang ada di desa Harjawinangun. Untuk tempat pelaksanaannya bergilir dengan sistem acak sesuai penduduk jamiyah yang mendapatkan arisan. Kecuali dihari jum'at kliwon, pelaksanaannya digabung menjadi satu, semua jamiyah yang ada didesa. Dengan penentuan tempat setiap jam'iyah yang ada di desa Harjawinangun secara bergilir. Selain tahlilan ada juga kegiatan keagamaan setiap hari minggu malam senin yakni "*manakiban*" dilaksanakan setiap habis solat mahrib dan dilaksanakan di masjid baiturrohim salah satu masjid yang ada di desa Harjawinangun (Wawancara. 8 oktober 2020,).

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan suatu keadaan ekonomi dimasyarakat. Keadaan ekonomi merupakan suatu kedudukan yang secara rasional akan menetapkan seseorang kepada posisi didalam masyarakat. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. kecukupan kebutuhan dasar masyarakat baru terjangkau apabila pendapatan mata pencaharian cukup untuk menutupi kebutuhan dasar tersebut.(Basrowi : 65 : 2010).

Dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk desa Harjawinangun memiliki mata pencaharian yang beragam. Mata pencaharian merupakan suatu aktifitas masyarakat yang penting terhadap kelangsungan hidup di masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan, kebutuhan sandang dan kebutuhan yang lainnya. Berikut struktur mata pencaharian masyarakat desa Harjawinangun dilihat dari tabel .

TABEL VII
Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum / Tidak Bekerja	1,554 Orang
2	Buruh Harian Lepas	61 Orang
3	Petani	1220
4	Guru	62 Orang
5	Karyawan	225 Orang
6	Kepala Desa	1 Orang
7	Mengurus Rumah Tangga	853 Orang
8	Pedagang / Wirausaha	1,094 Orang
9	PNS	44 Orang
10	Pembantu Rumah Tangga	10 Orang
11	Pensiunan	6 Orang
12	Perangkat Desa	7 Orang
13	sopir	24 Orang
14	Dokter / Perawat	9 Orang
15	Pelajar / Mahasiswa	564 Orang
16	Ustadz/ Mubaligh	50 Orang
	Jumlah	5,748 Orang

Sumber : Buku Administrasi Desa Harjawinangun

Berdasarkan tabel data diatas bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Harjawinangun paling banyak yakni sebagai petani dan pedagang atau wirausaha. Setelah peneliti melakukan observasi mengenai desa tersebut, peneliti melihat bahwa luas tanah pertanian sangat banyak serta kesuburan tanah dan wilayah di desa harjawinangun sangat cocok untuk pertanian. Tanaman yang sering menjadi mayoritas untuk ditanam yakni padi dan jagung, ada juga beberapa penduduk desa harjawinangun yang menanam buah – buahan yakni pepaya. Walaupun demikian kondisi lahan pertanian penduduk desa hanya bergantung kepada musim penghujan saja, selanjutnya

para penduduk yang berprofesi sebagai petani dituntut untuk bisa mencari mata pencaharian yang lain disaat musim kemarau untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari karna lahan pertanian banyak yang tidak bisa dimanfaatkan. Selain menjadi petani banyak juga penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang. Profesi sebagai pedagang banyak sekali dari kalangan masyarakat yang masih memiliki usia rata – rata relatif muda yang banyak memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah ketas. Jenis perdagangan yang banyak dijalani yakni pedagang nasi goreng. Profesi ini dilakukan diluar kota seperti karawang, bandung, tanggerang, bogor, jakarta. Dengan harapan perdagangan yang dijalannya di luar kota dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomiannya.(wawancara. Erlina. 8 oktober 2020)

C. Kondisi Pemerintah Desa Harjawinangun

Pemerintah desa sesuai perundang undangan yang berlaku merupakan penyelenggara urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harjawinangun termasuk desa, desa yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dengan pengertian diatas pemerintah di desa Harjawinangun memiliki hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya sendiri. Pemerintah desa Harjawinangun memiliki struktur pemerintah yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yaitu sekretaris desa serta pelaksana teknis lapangan. Kepala desa dipilih dari pemilihan oleh rakyat desa untuk perangkat desa dibentuk dari penunjukan langsung oleh kepala desa. jumlah perangkat desa menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa. berikut struktur pemerintah di desa Harjawinangun.

TABEL. VIII
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Harjawinangun
Kec. Balapulang Kab. Tegal

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Moh. Badruzzaman
2	Sekretaris Desa	Erlina Supriatin
3	Kaur Tata Usaha dan Umum	M. Ru'yat
4	Kaur Keuangan	Subechi
5	Kaur Perencanaan	Ade Kurniawan
6	Kepsek Pemerintahan	Galih Purwoko
7	Kepsek Kesejahteraan	Khotibul Umam
8	Kepsek Pelayanan	Muhammad Hamzah

Sumber : Buku Administrasi Desa Harjawinnagun

Sebagai sebuah organisasi, terlebih sebagai organisasi yang berada dibagian dari satuan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Peran pemerintah dalam pembangunan desa sangat penting, demi untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik. Peran yang dimaksud sebagai peran terhadap penyelesaian permasalahan yang menghambat aktifitas masyarakat desa.

D. Visi Misi Desa Harjawinangun Tahun 2015 – 2019

Visi : Desa Harjawinangun sebagai Desa Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata

Makna Visi : **Desa Harjawinnagun** adalah suatu kesatuan wilayah dan masyarakat yang secara administrative berada dalam wilayah hukum desa harjawinnagun dengan segala potensi dan sumber daya. **Desa pertanian** adalah visi desa sebagai klaster bahan pokok makanan yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. **Berbasis perdagangan** adalah penunjang sektor pertanian. Pertanian yang dihasilkan masyarakat desa harjawinnagun agar nilai ekonomisnya dapat diperoleh

secara optimal. **Pariwisata** sektor pariwisata hendaknya akan dikembangkan adalah pariwisata sebagai desa wisata gua lawa.

Misi Desa :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta sarana prasarana pertanian, perdagangan dan pariwisata yang mendukung terwujudnya desa harrjawinnagun sebagai desa pertanian, perdagangan, pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan membangun budaya sehat, budaya belajar, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pendapatan asli desa dan mengelolanya secara transparan, jujur dan proporsional untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan pemerintahan umum.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DISEKTOR PERTANIAN DAN FAKTOR KENDALA SERTA PENDUKUNG

Pada bab ini dibahas mengenai hasil data yang diperoleh peneliti. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap informan, dokumen, observasi. Temuan – temuan data lapangan akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan sektor pertanian di desa Harjawinangun serta adakah kendala terhadap pembangunan sektor pertanian di desa Harjawinangun.

Adapun pemaparan diawal akan menjelaskan mengenai strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah desa harjawinangun pada tahun 2015 – 2019 serta bagaimana peran pemerintah desa harjawinangun terhadap pembangunan sektor pertanian pada tahun 2015 - 2019. Lebih lanjutnya pemaparan akan dilakukan mengenai analisis tentang peranan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pembangunan sektor pertanian serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sektor pertanian. Analisa data yang dimaksud adalah suatu interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan tetap berpedoman kepada masalah dan tujuan penelitian.

A. Strategi Kebijakan Pembangunan tahun 2015 – 2020 di desa Harjawinangun

Dalam rangka mewujudkan visi misi desa Harjawinangun, pemerintah desa dalam hal ini menetapkan strategi – strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai cita – cita yang tertuang dalam visi dan misi desa. strategi merupakan penerjemah dari butir – butir visi dan misi agar dapat implementatif dan konkret. Strategi merupakan suatu cara untuk mendapatkan pencapaian suatu tujuan, secara khusus strategi diartikan sebagai suatu pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi

sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Sebuah strategi memiliki tujuan sebagai suatu solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi serta sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan (langi: 2015).

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan setiap program strategis pembangunan dalam upaya memperkuat desa serta langkah mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera sebagai tujuan otonomi daerah. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu strategi pembangunan yang baik serta sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama (Jenifer dkk : tth : 2018)

Strategi pembangunan di desa Harjawinangun ditetapkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Musyawarah rencana pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan BPD, Lkmd, Ketua Rt, Ketua PKK, ketua RW, serta tokoh masyarakat desa harjawinangun. Musyawarah rencana pembangunan desa dilaksanakan di balai desa harjawinangun. Sebelum diadakanya musyawarah pembangunan desa. pemerintah desa yaitu kepala desa memerintahkan Ketua RW sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Harjawinangun untuk mendata kebutuhan masyarakat ditingkat wilayah dengan mengundang masyarakat diwilayahnya masing – masing. Pendataan tingkat wilayah bertujuan untuk memberikan gambaran kebutuhan pembangunan di masyarakat. Hasil dari pendataan wilayah nantinya akan dijadikan sebagai tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat oleh pemerintah desa. pendataan tingkat wilayah yang dilakukan diharapkan rencana pembangunan yang ditetapkan sesuai kebutuhan yang ada didesa.

“Proses penetapan Rencanan pembangunan desa harjawinangun dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG), sebelum pelaksanaan MUSREMBANG bapak kepala desa mengintruksikan kepada ketua rw untuk melaksanakan pendataan aspirasi tingkat wilayah terlebih dahulu. Tujuanya untuk tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat. Musyawarah tingkat wilayah

diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan – kebutuhan masyarakat didesa harjawinangun”(wawancara. Erlina. 8 oktober 2020).

Setelah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di desa Harjawinangun menghasilkan beberapa strategi kebijakan pembangunan desa, serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Harjawinangun.

Strategi dan kebijakan desa Harjawinangun untuk mewujudkan visi misi desa sebagai berikut.

1. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Strategi pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses pembangunan desa. pembangunan sarana prasarana desa tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadikan ketimpangan dalam proses pembangunann desa. strategi pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja supaya mampu bekerja dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dari berbagai cara seperti pelatihan, kursus, pembinaan, penyuluhan ataupun pendidikan (didi djazuli:2018:18:).

Begitupun Startegi Pembangunan yang ada di desa Harjawinangun yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang sebelumnya belum mampu menjadi mampu untuk bekerja dan sumber daya manusia yang sebelumnya kurang mampu menjadi mampu bekerja dengan maksimal . hal tersebut tidak terlepas dari tujuan yang ada di desa Harjawinangun sebagai desa pertanian.

Akan tetapi berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan di desa harjawinanagun. Strategi pembangunan sumber daya manusia dibidang pertanian peneliti menyimpulkan sesuai data yang didapat bahwa pemerintah desa belum memiliki strategi program secara khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor pertanian di desa Harjawinangun, padahal dalam pembangunan sektor pertanian dibutuhkan

kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan aktifitas pertanian, supaya dari kegiatan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Pembangunan Sarana Prasarana desa

Desa Harjawinangun merupakan desa yang termasuk desa yang memiliki banyak potensi sumber daya yang perlu di manfaatkan. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di desa Harjawinangun perlu adanya pembangunan sarana prasarana yang mendukung untuk menciptakan desa yang tangguh dan maju. Pembangunan sarana prasarana merupakan pembangunan yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Pembangunan sarana prasarana menjadi daya dukung di setiap kegiatan yang ada di masyarakat desa Harjawinangun. Peningkatan sarana prasarana penunjang secara umum menjadi penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pembangunan desa. Kegiatan pembangunan sarana prasarana apabila tidak tersedia pastinya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang di cita citakan.

Pembangunan sarana prasarana yang dilakukan pemerintah desa Harjawinangun bertujuan untuk menunjang pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata untuk mewujudkan desa Harjawinangun sebagai desa pertanian, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang di dapat bahwa pembangunan infrastruktur di desa harjawinangun yang kaitanya dengan pembangunan sektor pertanian beberapa telah dilakukan melalui strategi pembangunnan sarana prasarana yang dilakukan pemerintah desa harjawinangun, Pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat memperlancar aktifitas pertanian di desa harjawinnagun, akan tetapi dari hasil temuan peneliti bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah desa harjawinnagun belum secara menyeluruh dilakukan, dilihat dari permasalahan – permasalahan yang masih terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktifitas pertanian.

Secara umum pembangunan yang dilaksanakan di desa Harjawinangun pada tahun 2015 – 2020 sebagai berikut.

1. Pengaspalan Jalan Rw 1 – RW 4
2. Sektor kesehatan dengan pengadaan jambanisasi, drainase di wilayah Rw 1 – Rw 4 dan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu
3. Keamanan dengan membangun pos – pos keamanan di RW 1 – RW 4.
4. Pembangunan talud di RW 1 – RW 4
5. Pavingisasi di seluruh gang yang ada di RW 1 – RW 4.
6. Pembangunan perekonomian

Program kebijakan pembangunan merupakan rencana operasional yang berisi tentang program – program sektoral yang bertujuan untuk pencapaian suatu rencana yang diinginkan. Program yang baik akan mempunyai unsur – unsur pembaharuan kearah yang lebih baik. Program – program yang dirancang merupakan program yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada, keadaan – keadaan yang menjadi kelemahan – kelemahan dan hambatan – hambatan setiap kegiatan yang masyarakat lakukan. Selain itu menurut Tjokroamidjojo (1974) dikutip dari (Ita dkk : 891 : tth) suatu program yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Pengukuran dengan dana yang diperkirakan cukup untuk pelaksanaannya serta program pembangunan yang dilakukan memiliki kesinambungan dengan program – program lain. Karna pembangunan tidak berdiri sendiri.

B. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian pada tahun 2015 - 2019

Pemerintah desa Harjawinangun terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. perangkat desa Harjawinangun mempunyai fungsi untuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan wewenang serta fungsinya. Kepala desa serta perangkatnya memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan adanya peranan melalui upaya dan tindakan dari pemerintah desa yang optimal akan berpengaruh terhadap masyarakatnya (fauziah : 1212: 2015)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Harjawinangun mengenai bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan di sektor pertanian. Bahwa dapat disimpulkan dari data yang didapat bahwa beberapa peran dalam pembangunan di sektor pertanian. Peneliti mengklasifikasikan peranan pemerintah desa terhadap pembangunan di sektor pertanian yang ada di Desa Harjawinangun. Peran yang dilakukan pemerintah desa terhadap pertanian di desa Harjawinangun sebagai berikut.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sektor Pertanian.

Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahanya merupakan suatu wewenang yang memiliki fungsi dan tugas. Fungsi serta tugas pemerintah desa Harjawinnagun tidak terlepas dari yang namanya peran. Peran yang dilakukan pemerintah desa untuk memberikan semangat kepada masyarakat khususnya dibidang pertanian dan sebagai pendorong terhadap masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya agar dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang baik dan berkualitas. Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat petani. Pemerintah menjadi ujung tombang terhadap peningkatan pembangunan masyarakat dan berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat khususnya masyarakat petani. Dengan peningkatan pembangunan disektor pertanian yang dilakukan terhadap masyarakat pastinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya pemerintah terhadap peningkatan pembangunan khususnya di sektor melalui pembinaan masyarakat petani pastinya akan membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki profesi tani untuk dapat berkembang mandiri dan kreatif. Hal tersebut dapat membuka akses terhadap sumberdaya strategis yang dimiliki sebuah desa baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Hikmatul: 2015 : 1219).

Pembinaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan disektor pertanian. Pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta memberikan dorongan bagi

masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Menurut Wiranto (1999) dikutip dalam Dinar (2015 : 4) Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengangkat harkat martabat adalah melalui pembinaan masyarakat.

Pembinaan masyarakat dalam konteks pembangunan di sektor pertanian adalah pembinaan masyarakat melalui pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Dengan adanya kegiatan – kegiatan tersebut pastinya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa terutama pembangunan di sektor pertanian.

“penyuluhan tentang pertanian yang dilakukan pastinya akan berdampak positif bagi para masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki profesi petani di desa harjawinangun mas” (wawancara, miftahudin 13 oktober 2020).

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok tani yang ada di desa harjawinangun. Penyuluhan yang dilakukan diharapkan meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk melaksanakan tugas serta aktifitasnya dengan baik.

Penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai bagian usaha dalam pembangunan di sektor pertanian yang merupakan pendidikan non formal terhadap petani dan anggota masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di sektor pertanian (Soeharto, N.P2005) dikutip dari Dinar (2015:4) berdasarkan pengertian diatas bahwa penyuluhan pertanian menjadi sebuah pendidikan yang perlu dilakukan yang memiliki artian sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani maupun anggota masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di sektor pertanian sehingga pada akhirnya secara mandiri dapat melakukan aktifitas pertanian dengan baik.

Selanjutnya, bahwa penyuluhan dapat diartikan sebagai pendidikan yang menjadi hak masyarakat desa, serta menjadi kewajiban bagi pemerintah desa sebagai pemerintah paling bawah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan untuk memberikan hak pendidikan yang perlu diterima masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Penyuluhan pertanian dapat dilakukan pemerintah desa dengan mendatangkan motivator atau penyuluh dibidang pertanian seperti dinas pertanian setempat, dosen pertanian ataupun seseorang yang mempunyai kapasitas penyuluh dibidang pertanian. Kedatangan motivator atau penyuluh dalam hal ini pastinya akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat petani. Penyuluhan sebagai wujud pembinaan masyarakat petani desa dapat dilakukan pemerintah desa melalui kelompok – kelompok tani yang ada di desa Harjawinangun.

Penyuluhan dibidang pertanian memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pola tanam padi yang baik, pemilihan bibit yang baik pada saat musim penghujan maupun musim ketiga supaya pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal. Keberadaan motivator yang didatangkan juga akan memiliki manfaat sebagai solusi pengetahuan bagi masyarakat petani untuk mengetahui bagaimana penentasan permasalahan yang terjadi dalam aktifitas pertanian seperti masalah pemberantasan hama dan masalah – masalah yang lain dalam pertanian (Ita dkk : tth : 894). Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan akan meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya dan meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di desa harjawinangun setiap tahunnya. Akan tetapi pembinaan terhadap masyarakat petani di desa Harjawinangun melalui penyuluhan di bidang pertanian belum ada sampai saat ini. Seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris desa saat ditemui peneliti.

“Belum ada program pembinaan secara khusus kepada petani melalui penyuluhan dibidang pertanian kepada masyarakat di desa Harjawinangun”(wawancara erlina 8 oktober 2020)

Senada dengan pernyataan yang diberikan tokoh masyarakat yaitu ketua kelompok petani di desa Harjawinangun. Bahwa belum ada upaya atau tindakan dari pemerintah desa untuk memberikan pembinaan masyarakat petani di desa Harjawinangun melalui penyuluhan.

“ Pemerintah desa belum pernah mengadakan penyuluhan tentang pertanian mas, penyuluhan kepada petani pernah ada cuman yang mengadakan dari kelompok tani sendiri yang mengadakan, tidak ada keikutsertaan dan andil dari pemerintah desa dalam pelaksanaan penyuluhan (Miftahudin, 13 Oktober 2020).

Kaitanya dengan penjabaran bahwa belum ada pembinaan secara khusus terhadap masyarakat dibidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah desa. padahal seharusnya pembinaan terhadap masyarakat menjadi tugas atau fungsi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahannya. Seperti apa yang ada didalam undang undang No 6 tahun 2016 tentang desa, bahwa pembinaan masyarakat menjadi tugas pemerintah desa. pembinaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat didalam perundang undangan yang berlaku merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan.

Tugas dan fungsi pemerintah erat kaitanya dengan sebuah peran yang dilakukan pemerintah desa. Peran pemerintah tersebut merupakan peran pemerintah desa sebagai motivator pemerintah desa sangat dibutuhkan bagi masyarakat petani. Peran pemerintah sebagai motivator diartikan oleh tjokroaminoto sebagai peran pemerintah desa untuk

menyemangati dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pembangunan yang dilakukan tercapai, dan suatu saat pembangunan yang dilakukan menjadi penopang perekonomian yang baik serta menjadi suatu keistimewaan desa (Anggi:1098 : 2013).

2. Pelayanan Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani

Pelayanan pemerintah yang baik menjadi salah satu faktor penting terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan desa. pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat merupakan hal yang wajib bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan terhadap masyarakat pada dasarnya banyak sekali pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah desa sangat luas. Pelayanan disini dimaksudkan hanya pelayanann terhadap pelayanan dibidang pertanian saja. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayananan pemerintah desa terhadap masyarakat dibidang pertanian, seperti apabila masyarakat petani membutuhkan yang berkaitan dengan pertanian seperti perbaikan dibidang pertanian pemerintah harusnya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Bahwa setelah melakukan penelitian pelayan terhadap masyarakat petani masih kurang baik. Dilihat dari permasalahan – permasalahan yang muncul di bidang pertanian yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa belum di carikan solusi oleh pemerintah desa.

“saya selaku ketua Rw sudah menyampaikan keluhan – keluhan mengenai permasalahan – permasalahan kepada pemerintah desa mas, seperti petani membutuhkan sumber mata air serta kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan aktifitas pertanian secara maksimal dan baik tapi sampai saat ini belum ada tindakan mengenai solusi kepada masyarakat di bidang pertanian”(Sholeleh 13 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat petani sudah menyampaikan aspirasinya yang merupakan kendala serta

permasalahan yang ada di pertanian, akan tetapi pemerintah desa belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

3. Pembangunan Infrastruktur Di Sektor Pertanian

Pembangunan sarana prasarana merupakan pembangunan secara fisik yang dapat memberikan daya dukung terhadap kegiatan – kegiatan masyarakat desa. pembangunan infrastruktur menurut kelompok bidang keahlian manajemen rekayasa konstruksi ITB (2001) dikutip dari Anggi (2013 : 1099) memiliki artian sebagai bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pembangunan infrastruktur merupakan faktor pendukung di setiap aktifitas masyarakat yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara maksimal dan baik.

Desa Harjawinangun merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya di bidang pertanian. Potensi sumber daya manusia di desa Harjawinangun dapat dilihat dari struktur mata pencaharian di desa Harjawinangun, bahwa sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Profesi sebagai tani sudah menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa Harjawinangun. Para petani desa dalam memanfaatkan lahan persawahanya sebagai pertanian padi dan jagung. Potensi sumber daya alam di desa Harjawinangun dapat dilihat melalui luas wilayah desa Harjawinangun yang memiliki sepertiga wilayahnya menjadi wilayah persawahannya dengan kondisi tanah yang subur serta dapat dimanfaatkan untuk aktifitas di bidang pertanian.

“Desa harjawinangun memang memiliki potensi pertanian, mata pencaharian penduduk desa harjawinangun sebagian besar sebagai petani. Karna sebagian besar wilayah desa harjawinangun sebagian lahan pertanian”(wawancara. Erlina. 8 oktober 2020)

Dalam menjalankan aktifitas pertanian, masyarakat pastinya membutuhkan daya dukung dari segi insfrastruktur yang memadai untuk menjalankan aktifitas tersebut. Sesuai hasil dari penelitian bahwa beberapa

infrastruktur untuk pembangunan sektor pertanian di desa harjawinangun sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan Sebagai Akses Transportasi Untuk Memperlancar Aktifitas Pertanian.

Jalan menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang aktifitas masyarakat petani di desa Harjawinangun, dengan adanya pembangunan jalan didorong untuk memudahkan masyarakat petani dalam menjalankan aktifitas disektor pertanian serta memperlancar perekonomian didesa harjawinangun, keberadaan jalan didesa harjawinangun sudah cukup baik. Dengan adanya akses jalan yang baik masyarakat petani lebih mudah dalam hal mengangkut hasil dari pertanian serta memudahkan masyarakat petani untuk akses peralatan pertanian seperti alat pembajak sawah.

b. Pembangunan Irigasi

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa infrastruktur Irigasi di desa harjawinangun belum tertata dengan baik serta belum mengakomodir untuk kegiatan masyarakat khususnya dibidang pertanian. Irigasi merupakan hal penting terhadap aktifitas masyarakat desa Harjawinangun. Irigasi terdiri dari irigasi sumber air dan irigasi untuk penyalur air dari irigasi sumber sampai lahan persawahan. Ketersediaan Irigasi di desa Harjawinangun belum memenuhi untuk melaksanakan aktifitas dibidang pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas irigasi sumber yang ada di desa Harjawinangun masih kurang untuk mengakomodir kegiatan masyarakat dalam pertanian. Keterbatasan irigasi sumber mengakibatkan permasalahan dalam aktifitas masyarakat dalam pertanian. Seperti apa yang dikatakan oleh ketua kelompok tani didesa harjawinangun.

“ Permasalahan pertanian di desa harjawinangun itu sumber mata air yang ada didesa belum banyak mas, serta irigasi saluran air untuk menyalurkan air untuk pertanian masih kurang, petani biasanya menggunakan selang plastik untuk mengairi lahan sawahnya.

Ketersediaan sumber mata air yang ada juga masih sangat kurang untuk melaksanakan aktifitas pertanian.(miftahudin. 13 oktober 2020)

Senada dengan apa yang dikatakan sekretaris desa. bahwa sumber mata air sebagai permasalahan dalam menjalankan aktifitas masyarakat dibidang pertanian.

“Pertanian di desa harjawinangun memang menjadi potensi sumber daya alam. Akan tetapi dalam pelaksanaan aktifitas masyarakat di pertanian mengalami permasalahan mengenai kurangnya sumber mata air untuk aktifitas tersebut”.(Erlina, 8 Oktober 2020)

Dengan adanya permasalahan ketersediaan irigasi di desa Harjawinangun mengakibatkan lahan persawahan tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Seperti apa yang dapat kita ketahui bahwa dalam setiap aktifitas masyarakat yang maksimal membutuhkan daya dukung sarana prasarana yang mendukung pula. Keberadaan infrastruktur dibidang pertanian menjadi permasalahan yang timbul dalam aktifitas masyarakat khususnya petani.

Sesuai dengan hal tersebut perlunya upaya – upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini memang belum terlaksana sebagai upaya solusi dari permasalahan yang dihadapi.

“ Rencana pembangunan sarana prasarana pembangunan di sektor pertanian sudah ada mas, salah satunya yaitu pembangunan irigasi . Akan tetapi belum dilaksanakan sampai saat ini, karna kendala pendanaan yang kurang memadai. Pembangunan yang dilakukan desa baru dibidang kesehatan dan transportasi jalan desa serta pavingisasi di jalan gang desa. untuk beberapa pembangunan irigasi insya allah akan dilakukan tahun ini”(wawancara erlina 8 oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa pembangunan infrastruktur di bidang pertanian ditahun 2015- 2019 belum dilakukan. Pembangunan infrastruktur irigasi untuk menunjang peningkatan aktifitas

masyarakat disektor pertanian. Pembangunan irigasi baru akan dilakukan beberapa tahun kedepan, pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan untuk menjadi daya dukung dalam aktifitas masyarakat yakni pembangunan jalan dan pavingisasi di gang desa. Faktor pendanaan yang belum mencukupi menjadi sebuah kendala pembangunan secara menyeluruh diberbagai sektor didesa karna pembangunan irigasi di desa harjawinangun memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan melihat dari keadaan dan kebutuhan yang paling urgen untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

C. Analisis Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Pertanian

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator. Merupakan peran yang dilakukan pemerintah desa sebagai narasumber yang baik untuk menentaskan permasalahan – permasalahan yang dihadapi masyarakat. Serta dapat memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat sehingga memudahkan dan memperlancar kegiatan yang dilakukan. Usaha – usaha pemenuhan kebutuhan ditujukan untuk penunjang daya dukung terhadap aktifitas masyarakat lakukan. Fasilitas – fasilitas yang diberikan bermacam – macam bentuknya seperti berupa program pembangunan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, (Anggi:1098 : 2013).

Peran pemerintah desa harjawinangun sebagai fasilitator telah dilakukan terhadap pembangunan sektor pertanian, pembangunan yang dilakukan mengenai perbaikan jalan ditujukan untuk mempermudah akses dalam melakukan aktifitas pertanian bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tentunya belum secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi masyarakat di sektor pertanian yang ada di desa Harjawinangun. Akan tetapi pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan terbesar dalam pembangunan pertanian di desa harjawinangun mengenai ketersediaan irigasi dengan

menentukan kebijakan program pembangunan irigasi yang akan dilakukan ditahun 2020 – 2021.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator. Merupakan peran yang dilakukan pemerintah desa untuk menyemangati dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang baik, sehingga tujuan pembangunan tercapai, dan suatu saat pembangunan yang dilakukan menjadi penopang perekonomian yang baik serta menjadi suatu keistimewaan desa (Anggi:1098 : 2013). Peran pemerintah sebagai motivator sangat penting bagi masyarakat petani di desa Harjawinangun sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Peran motivator dapat juga dilakukan dengan mengundang pihak – pihak yang dapat menggantikan pemerintah desa dalam menyemangati dan mendorong masyarakat lebih kreatif dalam aktifitasnya dibidang pertanian. Peran ini dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun pendidikan non formal yang diadakan pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam menjalankan aktifitasnya. Akan tetapi berdasarkan data penelitian yang di dapat bahwa pemerintah desa harjawinangun belum melakukan peran pemerintah sebagai motivator terhadap masyarakat.

3. Peran Pemerintah Sebagai Mobilizator

Peran Pemerintah sebagai Mobilisator, merupakan suatu peran yang dilakukan pemerintah sebagai pengarah sekaligus penggerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan yang berguna dimasyarakat secara merata. Pada hakekatnya pemerintah desa harus bisa mengajak masyarakat desa melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (Mahayana : 2013 : 403). Peran ini dilakukan menggerakkan masyarakat untuk menumbuhkan semangat bagi masyarakat petani dalam menjalankan aktifitasnya serta dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa harjawinanagun.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah desa harjawinangun belum menjalankan peran sebagai mobilizator dengan baik. Dilihat dari hasil temuan data penelitian. Belum adanya program – program secara khusus untuk menggerakkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas pertanian di desa harjawinnagun.

4. Peran Pemerintah Sebagai Enterpreneur

Peran pemerintah sebagai enterpreneur yaitu peran pemerintah untuk bertanggung jawab melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, pengelolaan aset – aset sumber daya ekonomi potensial yang ada didaerah kedudukannya, sehingga dapat memberikan keuntungan dan manfaat (Menurut Munir (2010 : 19) dikutip dari (Murdiana asih dkk : tth : 266). Peran tersebut merupakan peran pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan desa diharaskan melaksanakan peranya dalam pembangunan dengan mengelola sumber daya potensial yang ada di desa kedudukannya.

Peran pemerintah desa harjawinnagun dalam menjalankan pemerintahanya terhadap sumber daya potensial yang ada di desa harjawinnagun belum secara optimal. Dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia yang belum diberdayakan secara maksimal dan potensi sumber daya alam yang ada di desa belum di manfaatkan secara maksimal.

D. Faktor Pendukung Dan Kendala Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Sektor Pertanian

Berdasarkan penelitian bahwa dalam menjalankan perananya, pemerintah mengalami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pembangunan pertanian. potensi sumber daya yang ada di desa harjawinangun menjadi faktor pendukung dalam pembangunan di sektor pertanian.

Potensi sumber daya manusia di desa harjawinangun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di sektor pertanian. sumber daya manusia didesa harjawinangun dapat diihat dari segi mata pencaharian di desa harjawinagun serta keinginan masyarakat untuk lebih maju dibidang pertanian. Masyarakat desa harjawinangun yang berprofesi sebagai petani desa cukup

banyak. profesi sebagai petani di desa Harjawinangun sudah dilaksanakan sejak lama. Masyarakat desa Harjawinangun memanfaatkan lahan pertanian sebagai lahan pertanian padi dan jagung serta ada yang sudah memulai memanfaatkan lahannya sebagai perkebunan buah buahan. Faktor pendukung yang lain dari keadaan sumber daya alam.

Desa Harjawinangun memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satu sumber daya alam di desa Harjawinangun yakni lahan pertanian yang cukup luas. Lahan pertanian banyak dimanfaatkan masyarakat desa sebagai lahan pertanian padi serta jagung.

“Potensi sumber daya alam di desa harjawinangun cukup banyak sebagai lahan pertanian yang menjadi pusat mata pencaharian sebagian penduduk desa Harjawinangun yang perlu dikembangkan akan tetapi pendanaan yang ada di desa tidak bisa mencakup secara keseluruhan untuk pembangunan yang sudah di rencanakan dalam rencana pembangunan desa yang sudah ditetapkan”. (wawancara erlina 8 oktober 2020)

Dalam menjalankan peranya pemerintah desa harjawinangun juga mengalami kendala yang cukup besar yakni dalam hal pendanaan. Seperti apa yang telah diketahui bahwa pemerintah desa sudah merencanakan strategi pembangunan terutama di sektor pertanian. akan tetapi rencana – rencana tersebut tidak berjalan karena terkendala di pendanaan yang tidak bisa mencukupi untuk pembangunan irigasi. Pembangunan irigasi di desa Harjawinnagun baru akan bisa dilaksanakan pada tahun 2021 dengan bantuan anggaran dari daerah yang telah diajukan oleh pemerintah desa harjawinnagun. Irigasi menjadi permasalahan terbesar pertanian di desa harjawinangun. Pendanaan yang ada di desa hanya mampu digunakan untuk pembangunan di sektor lain seperti sektor kesehatan serta pembangunan jalan jembatan penghubung antar wilayah dan gang secara menyeluruh di desa harjawinagnun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta penjelasan yang telah diuraikan serta dilakukan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, mengenai peran pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah di wilayahnya. Peran pemerintah untuk menunjukkan perannya belum sepenuhnya terselenggara dengan baik terhadap pembangunan di sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peran yang dilaksanakan belum memperlihatkan hasil yang diharapkan masyarakat serta pemerintah desa terhadap pembangunan desa di sektor pertanian. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang merupakan peran yang dilakukan pemerintah desa sebagai narasumber yang baik untuk menentaskan permasalahan – permasalahan yang dihadapi masyarakat. Serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan masyarakat di sektor pertanian telah dilakukan, akan tetapi peran yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan pertanian yang ada di desa harjawinangun kecamatan balapulang kabupaten tegal. Sebagai fungsi fasilitator, pemerintah desa harjawinangun masih mengalami kendala dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan pertanian di desa tersebut. Selain itu peran pemerintah sebagai motivator kepada masyarakat desa harjawinangun pemerintah desa yaitu kepala desa telah menjalankan peran motivator tersebut melalui sambutan – sambutan yang dilakukan di acara – acara masyarakat desa seperti pada saat peringatan – peringatan hari besar yang diselenggarakan masyarakat desa harjawinangun. Akan tetapi dilihat dari program – program yang diselenggarakan secara khusus untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani serta meningkatkan semangat masyarakat terhadap pemanfaatan potensi desa yaitu sektor pertanian seperti pembinaan masyarakat di bidang pertanian melalui penyuluhan, pendidikan ataupun

pelatihan di bidang pertanian maupun pertemuan – pertemuan secara khusus untuk memotivasi masyarakat di bidang pertanian pada tahun 2015 – 2019 belum diadakan.

Kedua, bahwa pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana pembangunan desa Harjawinangun belum secara menyeluruh bisa dilaksanakan karena kendala yang dihadapi pemerintah desa harjawinangun. Kendala pemerintah desa harjawinangun yaitu kendala pendaan yang belum mencukupi untuk melaksanakannya. mengingat masih banyak pembangunan yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu karena melihat keadaan seta kondisi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa yaitu pembangunan jalan, jembatan, pavingisasi gang – gang, drainase dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Permasalahan paling besar petani desa terletak di sarana prasarana pertanian irigasi. Pembangunan irigasi belum dilaksanakan karena membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Beberapa pembangunan irigasi di desa Harjawinnagun sebagai penunjang kegiatan pertanian masyarakat telah direncanakan pemerintah desa Harjawinnagun, pembangunan akan dilaksanakan ditahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba untuk membuat saran – saran sebagai masukan yang mungkin dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dapaun saran – saran yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembangunan sarana prasarana yang didasari dari kebutuhan terhadap aktifitas masyarakat khususnya pembangunan di sektor pertanian.
2. Diharapkan bagi pemerintah desa Harjawinagnun mengadakan program – program yang kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat petani . karena sumber daya manusia merupakan potensi desa. Pemberdayaan masyarakat petani ditujukan sebagai upaya peningkatkan sumber daya manusia di desa Harjawinangun. Pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan melalui kegiatan peatihan ataupun penyuluhan.

3. Diharapkan masyarakat desa Harjawinangun terus memberikan semangatnya serta partisipasinya dalam proses pembangunan desa di sektor pertanian, karena wilayah Desa harjawinangun sebagian besar wilayahnya yaitu lahan pertanian yang menjadi sumber daya alam desa harjawinagnun yang dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta. Gramedia. 1995)
- Akbar, Firyal.dkk . *Peran Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*.vol 3 Nomor 2 tanpa tahun
- Bahri bahri, tahun 2019 . *Peran pemerintah desa dalam pembangunan kewirausahaan pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal agrisamuda Vol 6 No 2 Desember 2019
- Herman. Dkk . *Kepemimpinan Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang* . Vol 8 No 2 Juni 2020
- Ulfa, Irma fitriana. Dkk . *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur*. Jurnal Politik Indonesia. tahun 2017
- Mahayana, Wayan. Tahun 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kauban Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Pemerintahan*, Vol 1 No 1, 2013.
- Telenggen, Terien .dkk. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Mando*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.Vol 3 No 3 Tahun 2019.
- Prihatsanti, Unika.dkk. Tahun 2018. *Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metodologi Ilmiah Dalam Psikologi*. *eJurnal Ugm*. Vol 26, No 2
- Dwiyanto, Heri.Tahun 2009. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan Di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung*.
- Haryadi, Dendi. Tahun 2018. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)*. Naskah Publikasi
- Putra.Tahun 2020. *Pengertian Data : Fungsi, Sumber, Jenis data dan Contohnya*. Artikel Salamadian.com. Februari 2020.
- Ferdiansyah, Fajar. Tahun 2019. *Politik Pembangunan (Studi Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng Di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng)*. E-Skripsi Uin Alaudin Makasar.

Fauzi, Nur Febri. Tahun 2018. *Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta*. Eskripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Septiana, Masdiniya. Tanpa tahun. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih Dan Aksesoris (Studi Kasus Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*.

Aflaha, Roihatun. Tahun 2015. *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Brebes*. Eskripsi Iain Purwokerto.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2017)

Undang –undang desa nomor 6 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Jenifer dkk. Tahun 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Winebetan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 1 No 1 tahun 2018.

Lubut, Nopel. Tahun 2015. *Peran Kepala Desa Menggalang Partisipasi Masyarakat Desa Long Nawang Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 No 2 tahun 2015.

Fauziah, Hikmatul. Tahun 2015. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan*. *Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan*. Vol 3 No 3 tahun 2015.

Setiawan, Anggi. Tahun 2013. *Peran Pemerintah Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal ilmu pemerintahan*. Vol 1 No 3 tahun 2013.

Murdiana dkk. Tanpa tahun. *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Non Formal (Studi Kasus; Eksistensi “ Kampung Inggris” Kabupaten Kediri)*. *Jurnal administrasi publik*. Vol 2 No 2 tanpa tahun.

- Dortea dkk. Tahun 2017. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Jurnal administrasi publik. Vol 4 No 49 tahun 2017.
- Ita dkk. Tanpa tahun. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal administrasi publik. Vol 1 No 5.
- Mustanir dkk. Tahun 2018. *Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Didesa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal ilmiah clean government. Vol 2 No 1 tahun 2018
- Djazuli, Didi. Tahun 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Vol 5 No 2 tahun 2018.
- M tahriri, Muchlas. Tahun 2015. *Good Urban Governance : Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar*. Jurnal ilmu pemerintahan. Vol 8 No 1 januari 2015.
- Basrowi dkk. Tahun 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan. Vol 7 No 1 April 2010.
- Dinar. Tahun 2015. *Hubungan pembinaan penyuluhan pertanian dengan peningkatan kemampuan kelompok tani*. Jurnal ilmu pertanian dan peternakan. Vol 3 No 2 Desember 2015
- Jaliansri, Jova dkk. *Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa popontolen kecamatan tumpaan kabupaten minahasa selatan (studi kasus di desa popontolen kecamatan tumpaan kabupaten minahasa selatan)*. Jurnal ilmu politik 2015.

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BALAPULANG
DESA HARJAWINANAGUN

Alamat : Jl. Harjawinanagun No. 11 Kec. Balapulang Kab. Tegal

No Kode Desa :
33.28.04.2011

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 470/808/x/2020

Yang bertanda yang dibawah ini Kepala Desa Harjawinanagun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Menerangkan bahwa :

Nama	: Faqo Difa'i
NIM	:1506016009
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal , 14 Maret 1997
Alamat	: Harjawinanagun Balapulang Tegal
Jurusan /Fakultas	: Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi	: POLITIK PEMBANGUNAN DESA (Studi tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pembangunan di Sektor Pertanian tahun 2015 – 2019 di Desa Harjawinangaun Kec. Balapulang Kab. Tegal

Bahwa nama tersebut di atas benar – benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Desa Harjawinanagun Kec. Balapulang Kab. Tegal.

Demikian surat keterangan tersebut kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Harjawinanagun, Oktober 2020
Kepala Desa Harjawinanagun
KEMANTAN BALAPULANG TEGAL
MOH. BADRUZZAMAN.

LAMPIRAN PERTANYAAN

WAWANCARA

5. Bagaimana Kondisi Sosial (Agama Pendidikan)Budaya (Tradisi Keagamaan) Di Masyarakat.
6. Bagaimana Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa. (Mata Pencaharian. Kesejahteraan Ekonomi. Struktur Ekonomi)
7. Apa Saja Program Pemerintah Terhadap Pembangunan Disektor Pertanian?
8. Peran Pemerintah Desa Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Pembangunan Di Sektor Pertanian ?
9. Bagaimana Pemerintah Desa Dalam Menentukan Pembangunan Desa ?
10. Bagaimana Pemerintah Desa Dalam Merencanakan Pembangunan ?
11. Apakah Ada Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Terhadap Aktifitas Pertanian. Pembangunan Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Didesa ?
12. Apakah Dalam Pembangunan Desa, Masyarakat Dilibatkan, Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan?
13. Apa Saja Kendala Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Disektor Pertanian Di Desa?
14. Apa Saja Faktor Pendukung Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Di Sektor Pertanian?
15. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Menangani Kendala Pembangunan ?

Lampiran. Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Erlina	Sekretaris Desa	8 Oktober 2020
2	Slamet Wiyono	Ketua BPD	13 Oktober 2020
3	Miftahudin	Ketua Kelompok Tani	10 Oktober 2020
4	Sholeh	Ketua RW 3	13 Oktober 2020
5	Abdul Ghopur	Anggota Kelompok Tani	14 Oktober 2020

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Kepala Kelompok Tani Desa Harjawinangun



Wawancara Bersama Bapak Ketua RW 3 Desa Harjawinanagun



Wawancara Denga Ketua BPD Desa Harjawinangun



Wawancara Bersama Sekretaris Desa Harjawinangun



Kantor Balai Desa Harjawinangun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Faqo Difa'i
2. Nim : 1506016009
3. Tempat,Tanggal lahir : Tegal, 14 Maret 1997
4. Agama : Islam
5. Alamat : Harjawinnangun Kec. Balapulang Kab. Tegal
6. No. Hp : -
7. Email : Faqodfa@Gmail.Com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus
1	MI Salafiyah Danawarih Balapulanag Tegal	2008
2	MTA Al Mu'awanah Harjawinangun Balapulang Tegal	2011
3	MAN Babakan Lebaksiu Tegal	2014

2. Pendidikan Non Formal

- a. OCEAN Kediri
- b. HEC 02 Kediri
- c. CRESNA Kediri

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Harjawinnangun, Oktober 2020

Faqo Difa'i